



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 4-5 Kuningan Jakarta 12940, Po.Box. 3489
Telp. 021-5253004/52565989 Fax. 021-5252975 SMS. 08170003489
Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id>, Surel: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.PW.03.04-62 5 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Yth.

1. Para Pimpinan Unit Utama;
 2. Para Kepala Kantor Wilayah;
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
di tempat

Merujuk Surat kami sebelumnya ditujukan kepada Pimpinan Satuan Kerja (Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja) Nomor ITJ.OT.02.02-04, tanggal 7 Juli 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dilaksanakan secara *online* pada tanggal 25 Juli s.d 30 September 2022 melalui website <http://itjen.kemenkumham.go.id>;
- b. Penghargaan dan ucapan terima kasih atas kerjasama seluruh Satuan Kerja yang telah berpartisipasi mengikuti survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Tahun 2022;
- c. Hasil PMPI merupakan dasar pengukuran salah satu target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal, yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJIP/LKIP);
- d. Survei PMP online diikuti oleh 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah beserta UPT, sedangkan untuk Kanwil dan UPT yang belum mengikuti survei PMPI *online* dimaksud adalah Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Papua;
- e. Jumlah responden yang mengisi survei PMPI sebanyak 32.710 responden terdiri dari 28501 responden internal dan 4209 responden eksternal/masyarakat pengguna layanan;
- f. Survei PMPI meliputi dua jenis survei yaitu PMPI Internal diisi oleh pegawai Kemenkumham dengan Indikator Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan SDM dan Pengelolaan Anggaran, sedangkan indikator PMPI eksternal diisi oleh

- pengguna layanan Kemenkumham dengan dua indikator yaitu Budaya Integritas Organisasi dan Budaya Integritas Kerja;
- g. Pada PMPI Tahun 2022 ini dilakukan mekanisme penilaian lapangan ke 4 Kantor Wilayah yaitu Kanwil DI.Yogyakarta, Kanwil Jawa tengah, Kanwil Sumatera Selatan dan Kanwil Kalimantan Barat. Penilaian lapangan dilakukan sampling dikarenakan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan pergerakan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan anggaran perjalanan dinas lapangan terkena blokir *Auto Adjustment* anggaran melalui mekanisme penghematan belanja negara untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 secara Nasional, antisipasi Pemilihan Umum dan perpindahan ke Ibu Kota Negara baru di Kalimantan;
 - h. Hasil akhir PMPI Tahun 2022 memperoleh hasil penilaian/indeks rata-rata sebesar 95,26 dari Indeks Internal sebesar 94.68 dan Eksternal sebesar 95,84. Terdapat kenaikan indeks dari tahun 2021 dari 91,82 sebesar 3,44 (3,75%) dan indikator terendah masih sama dengan Tahun 2021 yaitu Sistem Anti Korupsi dan Budaya Integritas Organisasi;
 - i. *Highlight* dari hasil survei masih terdapat pegawai Kemenkumham melihat/mendengar pelaku korupsi/pungli/ suap terungkap serta masih terdapat masyarakat pengguna layanan pernah diminta uang (administrasi, transportasi, rokok, kopi dan lainnya), pernah diminta barang diluar ketentuan saat berurusan dengan pegawai dan pernah diminta fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai;
 - j. Kendala survei PMPI adalah responden belum optimal, menurun dari Tahun 2021, belum seluruh pegawai mengisi survei, hanya 43.8% yang mengisi yaitu 28.501 pegawai dari total 65.064 pegawai Kemenkumham demikian juga jumlah responden eksternal/pengguna layanan menurun dibanding Tahun 2021. Hal ini disebabkan survei PMPI bersamaan pelaksanaannya dengan survei SPI oleh KPK dan survei Integritas oleh Balitbang Hukum dan HAM, sehingga responden bingung dengan banyaknya survei sejenis;
 - k. Bahwa untuk meminimalisir kendala dimaksud pada huruf (j), di Tahun 2023 survei PMPI tidak dilaksanakan dengan pertimbangan Inspektorat Jenderal sebagai Mitra Kerja akan fokus dalam penguatan survei SPI-KPK. Penguatan akan dilaksanakan dengan mengikutkan satuan kerja dalam Sosialisasi SPI-KPK baik secara langsung maupun online, mendata jumlah pegawai dan jumlah pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, mendata jenis layanan Kemenkumham, koordinasi dengan KPK selama pelaksanaan, koordinasi dengan Biro Perencanaan dan satuan kerja setiap tahap proses survei SPI-KPK serta menyusun rencana aksi rekomendasi hasil SPI-KPK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan ucapan terima kasih.



Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP 196511281991031002

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



**T
A
H
U
N

2
0
2
2**

LAPORAN PENILAIAN MANDIRI PERSEPSI INTEGRITAS

**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyelesaikan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penilaian dimaksud dan untuk mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. PMPI menambah khasanah dalam pelaksanaan survei seperti halnya survei persepsi satker untuk mengukur kinerja APIP

dalam melakukan pengawasan, survei IKM, dan IPK yang menggunakan *barcode* dari Balitbang Hukum dan HAM, survei saat penilaian PMPRB serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK. PMPI dilakukan dengan mekanisme survei *online*, dan penilaian kalibrasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu kepatuhan pelaporan LHKASN, LHKPN, tindaklanjut temuan internal-eksternal, data pengaduan masyarakat, data gratifikasi dan lainnya. Untuk PMPI di Tahun 2022 ini, dilakukan penilaian/survei lapangan dengan sampling 4 Kantor Wilayah saja dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan pergerakan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan anggaran perjalanan dinas lapangan terkena blokir *Auto Adjustment* anggaran melalui mekanisme penghematan belanja negara untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 secara Nasional, antisipasi Pemilihan Umum dan perpindahan ke Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. Namun demikian mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai terkait tingkat integritas pegawai maupun instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil PMPI sebagai dasar salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu Indeks Persepsi Integritas yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal dalam capaian targetnya serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pimpinan dalam upaya mendukung peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Semoga laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Tahun 2022 ini menjadi tambahan informasi yang berguna bagi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta, 5 Desember 2022
Inspektur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU
NIP 196511281991031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PENILAIAN MANDIRI PERSEPSI INTEGRITAS (PMPI) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Tahun 2022 merupakan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mengukur tingkat integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dilaksanakan melalui survei *online* pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> terhitung mulai tanggal 25 Juli s.d 30 September 2022, disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Satuan Kerja dengan surat Nomor ITJ.OT.02.02-04 tanggal 7 Juli 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. PMPI terdiri dari survei internal, eksternal dan penilaian lapangan dan penilaian faktor kalibrasi. Indikator penilaian PMPI internal yaitu Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan SDM dan Pengelolaan Anggaran, sedangkan indikator PMPI eksternal yaitu Budaya Integritas Organisasi dan Budaya Integritas Kerja. Survei PMPI *online* Tahun 2022 diikuti oleh 11 Unit eselon I dan 33 Kantor Wilayah beserta perwakilan UPT, sedangkan untuk Kanwil dan UPT yang belum mengikuti survei PMPI *online* dimaksud adalah Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Papua. Jumlah responden yang mengisi survei PMPI sebanyak 32.710 responden terdiri dari 28501 responden internal dan 4209 responden eksternal/masyarakat pengguna layanan). Pada PMPI Tahun 2022 ini dilakukan mekanisme penilaian lapangan ke 4 Kantor Wilayah sebagai satuan kerja sampling dikarenakan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan pergerakan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan anggaran perjalanan dinas lapangan terkena refocusing anggaran melalui mekanisme penghematan belanja negara untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 secara Nasional, antisipasi Pemilihan Umum dan perpindahan ke Ibu Kota Negara baru di Kalimantan.

Hasil akhir PMPI Tahun 2022 memperoleh hasil penilaian/indeks rata-rata sebesar 95,26 dari Indeks Internal sebesar 94,68 dan Eksternal sebesar 95,84. Terdapat kenaikan indeks dari tahun 2021 dari 91,82 sebesar 3,44 (3,75%) dan indikator terendah masih sama dengan Tahun 2021 yaitu Sistem Anti Korupsi dan Budaya Integritas Organisasi. Kendala dalam pelaksanaan PMPI Tahun 2022 adalah masih terdapat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan survei *online* PMPI yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua, hal ini disebabkan belum optimalnya satuan kerja merespon permohonan pengisian survei, selain itu ada survei sejenis yang bersamaan yaitu survei QR Code Balitbang Hukum dan HAM serta survei SPI oleh KPK. Hasil PMPI 2021 walaupun indeks rata-ratanya masuk dalam kategori Baik Sekali namun belum cukup menggambarkan keadaan integritas Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan jumlah responden belum sesuai dengan target, sehingga hasil penilaian dari Balitbang Hukum dan HAM serta SPI KPK tetap diperlukan sebagai khasanah dan referensi terkait integritas Kemenkumham. *Highlight* dari hasil survei masih terdapat pegawai Kemenkumham melihat/mendengar pelaku korupsi/pungli/ suap terungkap serta masih terdapat masyarakat pengguna layanan pernah diminta uang (administrasi, transportasi, rokok, kopi dan lainnya), pernah diminta barang diluar ketentuan saat berurusan dengan pegawai dan pernah diminta fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai.

Kata Kunci: PMPI Internal, PMPI, Eksternal, Indeks rata-rata PMPI.

Dalam upaya untuk mengukur salah satu pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu Indeks Persepsi Integritas yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal dalam capaian targetnya. Integritas merupakan salah satu tolak ukur reformasi birokrasi dan dalam rangka mengukur Persepsi Integritas perlu melakukan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini berdasar pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-07.0T.02.02 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2019, yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penilaian dimaksud. Adapun penilaian tersebut dilatar belakangi adanya tuntutan untuk pemenuhan capaian target Indeks Persepsi Integritas menjadi Indikator Kinerja Utama yang diturunkan ke Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d 2024 (Renstra Kemenkumham dan renstra Itjen), yang kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selain itu PMPI sebagai alat ukur penilaian mandiri integritas, sejalan dengan penilaian SPI oleh KPK, dengan harapan dapat mengidentifikasi area yang rentan KKN serta tindakan lain yang mencederai budaya integritas untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja Kemenkumham.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang mendeskripsikan pelaksanaan penilaian mandiri.

2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengetahui tingkat persepsi integritas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah hasil penilaian persepsi atas integritas organisasi dan/atau Aparatur Sipil Negara Unit Utama dan/atau Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah dilakukan penilaian tahun 2022. Survei ini diikuti oleh 32.710 orang terdiri dari 28501 responden internal dan 4.209 responden eksternal/masyarakat pengguna layanan).

BAB II

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PERSEPSI INTEGRITAS (PMPI) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2022

A. Dasar Hukum Penilaian

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berdasar pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-07.OT.02.02 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2019.



Dalam pedoman tersebut bahwa Inspektorat Jenderal :

1. Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Jenderal;
2. Menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun 2021 ini merupakan Tahun ke empat pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum mengulas hasil penilaian PMPI Tahun 2021 akan kami uraikan *highlight* hasil PMPI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagai gambaran penilaian.

B. *Highlight* Pelaksanaan PMPI TAHUN 2019 DAN 2020

Sebelum menguraikan hasil PMPI Tahun 2022, dibawah ini adalah gambaran hasil PMPI Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN PMPi TAHUN 2019


Memperoleh indeks sebesar 87,59 dengan responden internal 5.240 orang, eksternal/pengguna layanan 1.574 orang.


M E T H O D O L O G I


SURVEY PMPi ONLINE


PELAKSANAAN ONLINE

 Quesioner menggunakan aplikasi pada website <http://www.itjen.kemenumham.go.id>

 Pelaksanaan survey online (ulang) 18 sd 31 Oktober 2019

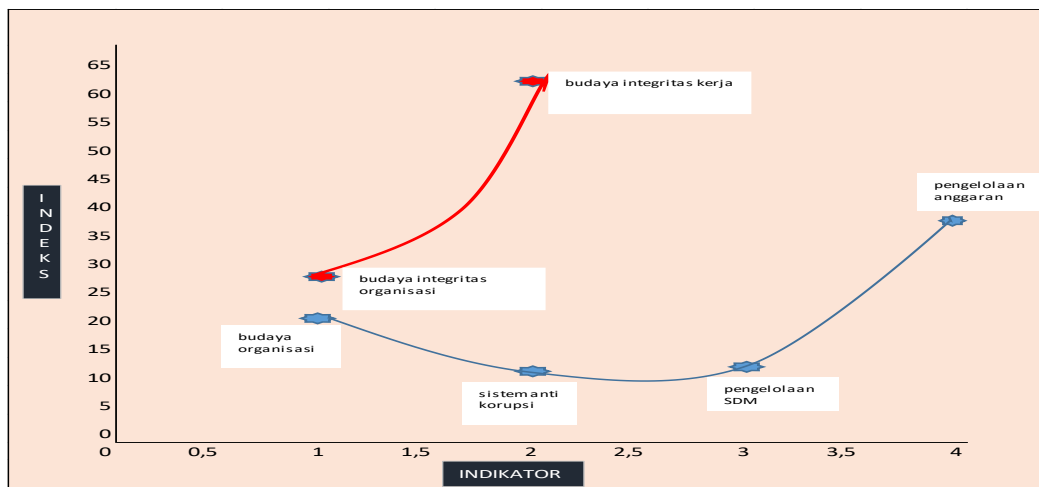
 Responden **Internal** sebanyak 5.240 pegawai terdiri dari:
 Unit Eselon I = 509 pegawai
 Kanwil = 722 pegawai
 UPT PAS = 3.022 pegawai
 UPT Imigrasi = 977 pegawai

 Unit Sample Internal sebanyak 356 unit sample, terdiri dari:
 11 UKE- I (minimal 2 unit UKE-2) = 22 unit
 33 Kanwil (minimal 5 UPT PAS, 5 UPT IM dan BHP) = 134 satker

 Responden **Eksternal / Pengguna Layanan** sebanyak 1574 orang
 Terdiri dari :
 Pengguna layanan 11 UKE-1 = 183 orang
 Pengguna layanan 33 Kanwil+BHP= 470 orang
 Pengguna layanan UPT-PAS = 499 orang
 Pengguna layanan UPT-IM = 422 orang

Total Responden Internal dan eksternal = 6814 ➔ **87,58% dari total target (7780 responden)**

Dengan perbandingan hasil survei per indikator sebagai berikut :



INTERNAL		EKSTERNAL	
INDIKATOR	INDEKS	INDIKATOR	INDEKS
Budaya Organisasi	21,08	Budaya Integritas Organisasi	29,02
Sistem Anti Korupsi	14,13		
Pengelolaan SDM	14,88	Budaya Integritas Kerja	62,90
Pengelolaan Anggaran	39,12		

Highlight terendah PMPI internal dan eksternal

- a. Indikator Sistem Anti Korupsi, masih terdapat :
 - Pelaku korupsi yg tertangkap sanksi terbesar yaitu pemindahan jabatan dan kode etik
 - Pegawai yang tidak percaya bahwa pelapor dilindungi/tidak dikucilkan
 - Pegawai yang melihat pelapor dikucilkan/dihambat karir
- b. Indikator Budaya Integritas Organisasi, masih terdapat bahwa asal-usul pengguna layanan menjadi faktor mempersulit/mempermudah pemberian layanan

2. PELAKSANAAN PMPI Tahun 2020

Memperoleh indeks sebesar 91,36 engan responden internal 3971 orang, eksternal/pengguna layanan 2806 orang.

METODOLOGI SURVEY PELAKSANAAN PMPI ONLINE

 Quesioner menggunakan aplikasi pada website <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>

 Pelaksanaan survey online 28 September s.d 24 Oktober 2020

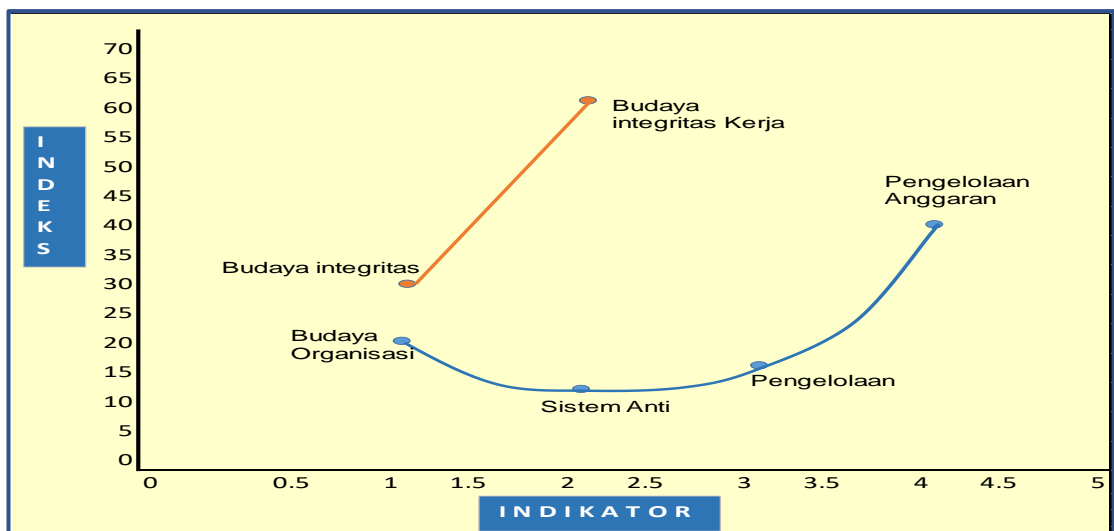
 Responden **Internal** sebanyak 3971 pegawai terdiri dari:
 Unit Eselon I = 535 pegawai
 Kanwil = 637 pegawai
 UPT PAS = 2050 pegawai
 UPT Imigrasi = 704 pegawai
 BHP = 45 pegawai

 Unit Sample Internal di sebanyak 11 UKE- I dan 29 Kanwil.
Dan tidak mengisi survei online PMPI yaitu Kanwil Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

 Responden **Eksternal** / Pengguna Layanan sebanyak 2806 orang
 Terdiri dari :
 Pengguna layanan 11 UKE-1 = 238 orang
 Pengguna layanan 29 Kanwil = 679 orang
 Pengguna layanan UPT-PAS = 1309 orang
 Pengguna layanan UPT-IM = 554 orang
 Pengguna layanan BHP = 26 orang

Total Responden Internal dan eskternal = 6777 ➔ **80,01% dari total target (4470 responden)**

Dengan perbandingan hasil survei per indikator sebagai berikut :



Dengan perbandingan hasil survei per indikator sebagai berikut:

Indikator PMPI Internal		Indikator PMPI Eksternal	
Budaya Organisasi	22,0	Budaya Integritas Organisasi	31,54
Sistem Anti Korupsi	14,75		
Pengelolaan SDM	15,83	Budaya Integritas Kerja	63,97
Pengelolaan Anggaran	40,12		

Indikator terendah PMPI Tahun 2020 yaitu Sistem Anti Korupsi dan Budaya Integritas Organisasi, dengan *highlight* sebagai berikut:

1) Sistem Anti Korupsi

- a) Masih terdapat pegawai pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Riau yang menjawab belum memahami sosialisasi anti korupsi yang diberikan kemenkumham.
- b) Masih terdapat pegawai pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Bengkulu, Banten, Lampung, NTB, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, yang menjawab sistem pencegahan korupsi yang ada di Kemenkumham sangat tidak percaya dapat efektif mencegah korupsi- (efektif mencegah/sistem tersebut mampu membuat pegawai menghindari korupsi).
- c) Masih terdapat pegawai pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Maluku Utara, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Tengah, Lampung, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan yang menjawab Sangat Tidak percaya pegawai yang terlibat korupsi/suap/gratifikasi akan diproses secara administrasi dan/atau hukum.


2) Budaya Integritas Organisasi


- a) Masih terdapat responden masyarakat pengguna layanan pada Kanwil Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah yang menjawab bahwa petugas memberikan perlakuan khusus (jalur cepat, prioritas, memotong antrian) pada orang tertentu dan pada orang/kelompok yang membayar, memiliki hubungan dengan pejabat.
- b) Masih terdapat responden masyarakat pengguna layanan pada Kanwil Kepulauan Riau, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta yang menjawab bahwa tidak mengetahui bahwa Kemenkumham telah memiliki tata cara menerima laporan masyarakat terkait korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya (tata cara pelaporan korupsi/gratifikasi/pungli dan lainnya serta tersedia nomor, saluran atau orang yang bisa dihubungi)
- c) Masih terdapat responden masyarakat pengguna layanan pada Kanwil Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta yang menjawab bahwa Kemenkumham akan memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan untuk masyarakat yang melaporkan korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya.


3. PELAKSANAAN PMPI TAHUN 2021

Memperoleh indeks sebesar 91,82 dengan responden internal 28501 orang, eksternal/pengguna layanan 42019 orang

METODOLOGI SURVEY PEMBIAN ONLINE


 Quesioner menggunakan aplikasi pada website
<http://www.itjen.kemenumham.go.id>


 Pelaksanaan survey online 28 September s.d 24 Oktober 2020

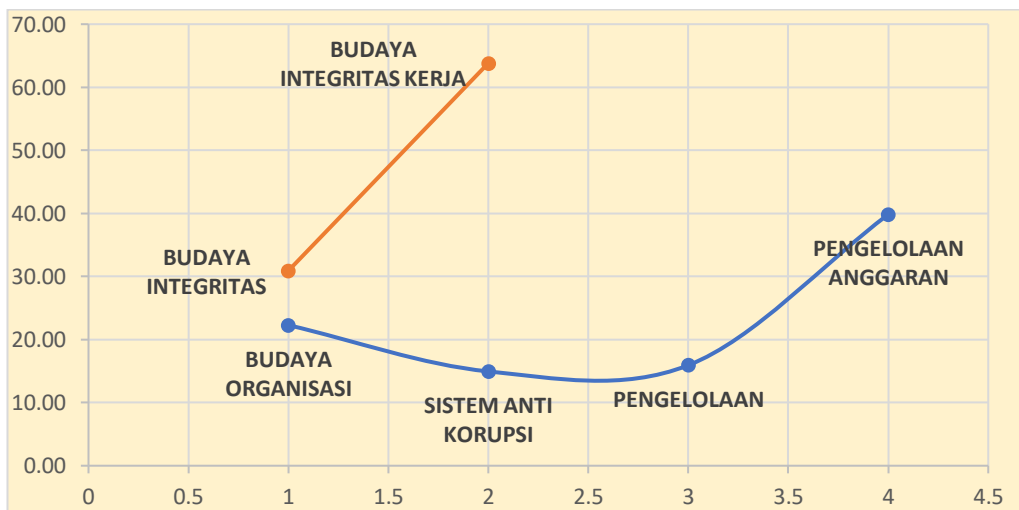

 Responden **Internal** sebanyak 3971 pegawai terdiri dari:
 Unit Eselon I = 535 pegawai
 Kanwil = 637 pegawai
 UPT PAS = 2050 pegawai
 UPT Imigrasi = 704 pegawai
 BHP = 45 pegawai


 Unit Sample Internal di sebanyak 11 UKE- I dan 29 Kanwil.
 Dan tidak mengisi survei online PMPI yaitu Kanwil Sulawesi Utara, Slawei Tenggara, Maluku dan Papua.


 Responden **Eksternal** / Pengguna Layanan sebanyak 2806 orang
 Terdiri dari :
 Pengguna layanan 11 UKE-1 = 238 orang
 Pengguna layanan 29 Kanwil = 679 orang
 Pengguna layanan UPT-PAS = 1309 orang
 Pengguna layanan UPT-IM = 554 orang
 Pengguna layanan BHP = 26 orang

Total Responden Internal dan eksternal = 6777 → 80,01% dari total target (4470 responden)

Dengan perbandingan hasil survei per indikator sebagai berikut :



Dengan perbandingan hasil survei per indikator sebagai berikut:

Indikator PMPI Internal		Indikator PMPI Eksternal	
Budaya Organisasi	22,56	Budaya Integritas Organisasi	31,96
Sistem Anti Korupsi	15,16	Budaya Integritas Kerja	63,88
Pengelolaan SDM	16,40		
Pengelolaan Anggaran	40,56		
Indeks Rata2 PMPI Internal	94,68	Indeks Rata2PMPI Eksternal	95,84
Indeks Rata2 PMPI Tahun 2021 = 95,26 (sangat baik)			

Skala Penilaian :

- 0-20 = Sangat Buruk
- 21-40 = Buruk
- 41-60 = Cukup
- 61-80 = Baik
- 81-100 = Sangat Baik

Indikator terendah PMPI Tahun 2021 yaitu Sistem Anti Korupsi (Indikator PMPI Internal) dan Budaya Integritas Organisasi (Indikator PMPI Eksternal) dengan *highlight* sebagai berikut:

Highlight Indikator Sistem Anti Korupsi, bahwa terdapat pegawai:

- a. yang belum memahami tentang sistem anti korupsi
- b. yang belum mengetahui bahwa Kemenkumham telah ada sistem pencegahan korupsi
- c. yang tidak percaya bahwa sistem anti korupsi di Kemenkumham itu efektif mencegah dan mampu membuat pegawai menghindari korupsi
- d. yang tidak percaya bila ada pegawai yang berbuat KKN akan diproses secara administrasi dan/ atau hukum
- e. yang melihat/ mendengar/ melaporkan pelaku KKN di Kemenkumham
- f. tidak percaya pegawai yang melaporkan praktik korupsi di instansi Anda akan mendapat perlindungan
- g. yang tidak tahu bahwa Kemenkumham terdapat mekanisme perlindungan pelapor
- h. yang tidak percaya bahwa pegawai yang melaporkan praktik korupsi akan mendapat perlindungan (memperoleh perlindungan berupa bebas dari sanksi, tidak dikucilkan, karir dihambat dan lainnya)

Highlight Indikator Budaya Integritas Organisasi, bahwa terdapat pengguna layanan Kemenkumham:

- a. yang sangat tidak percaya bahwa Kemenkumham telah menerapkan keterbukaan (transparansi)
- b. yang sangat tidak percaya bahwa pegawai telah melaksanakan prosedur kerja dengan baik
- c. sangat tidak percaya bahwa tidak ada pegawai yang memberikan perlakuan khusus atau prioritas pada orang tertentu (Perlakuan khusus/jalur cepat, prioritas, memotong antrian dan lainnya. memberikan layanan khusus pada orang/kelompok yang membayar, memiliki hubungan dengan pejabat dan lainnya).
- d. tidak percaya pengguna layanan sangat tidak percaya bila melakukan korupsi akan diproses secara hukum sesuai dengan kesalahannya.
- e. tidak percaya bahwa Kemenkumham telah memiliki tata cara menerima laporan masyarakat terkait korupsi, gratifikasi, pungli dan tersedia nomor, saluran atau orang yang bisa dihubungi.
- f. tidak percaya bahwa Kemenkumham akan memberikan perlindungan untuk masyarakat yang melaporkan korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya (memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan pelapor).
- g. sangat tidak percaya bila ada laporan masyarakat tentang korupsi akan ditindaklanjuti dan melakukan penyelidikan kejadian, memproses pelaku, pemberian sanksi kepada pegawainya.
- h. pernah dimintai uang (administrasi, transportasi, rokok, kopi dan lainnya) saat menggunakan layanan, dengan besar rata-rata dibawah Rp100.000,- memberikan makanan, diberikan secara sukarela oleh pengguna layanan menggunakan layanan, untuk mempercepat layanan dan ucapan terima kasih

BAB III

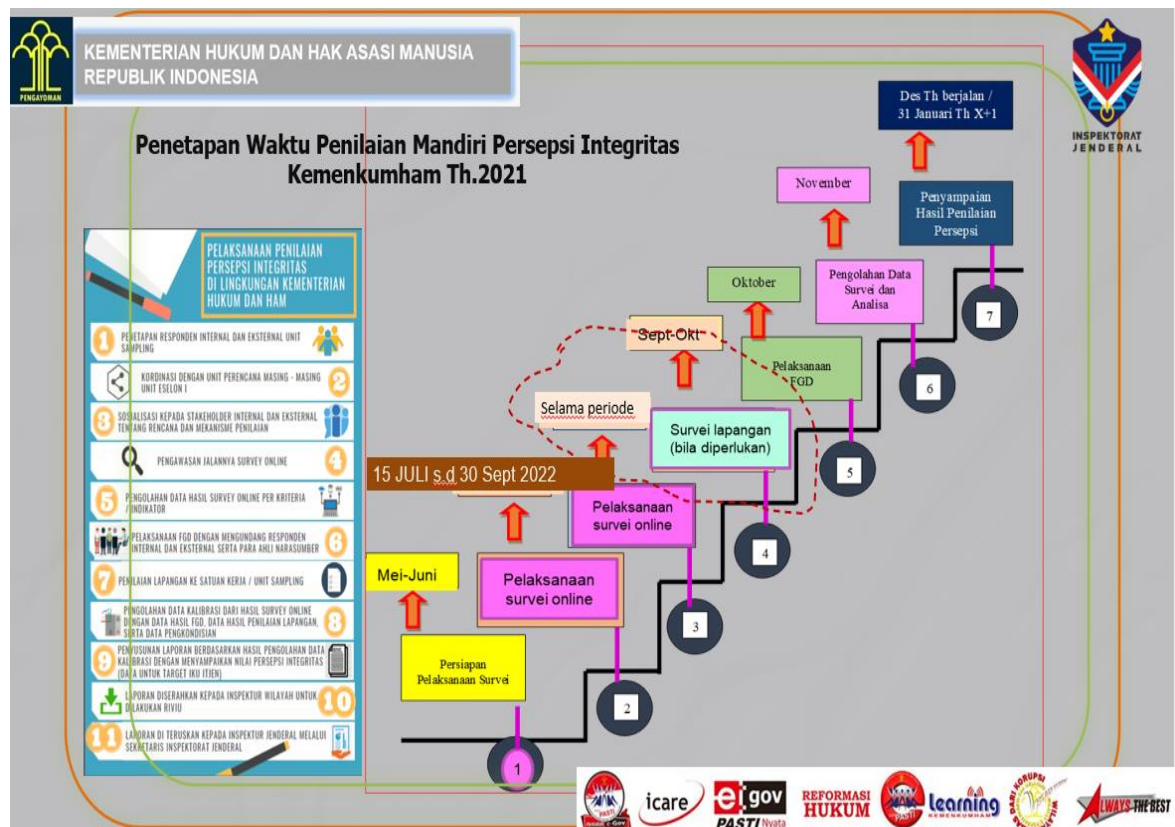
PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PERSEPSI INTEGRITAS TAHUN 2022

Penetapan waktu pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Tahun 2022 melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pemberitahuan Pelaksanaan Survei PMPI

Pemberitahuan akan waktu pelaksanaan survei PMPI diinformasikan melalui surat Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Satuan Kerja (Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja) melalui surat Inspektur Jenderal kepada para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor ITJ.OT.02.02-04 tanggal 7 Juli 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Tahun 2022.

Penetapan Waktu Pelaksanaan PMPI Tahun 2022



2. Sosialisasi Teknik Tata Cara Pengisian PMPI

Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan memahami tata cara pengisian survei PMPI, dilaksanakan Sosialisasi kepada responden (pegawai Kemenkumham), melalui mekanisme zoom meeting tanggal 2 Agustus 2022 dengan 950 peserta dilingkungan Kemenkumham yang mewakili Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, dan selain itu Pedoman Teknis Tata cara Pengisian PMPI juga di upload di website Itjen, demikian pula tentang update berkala setiap senin tentang rekapitulasi jumlah responden yang mengisi survei.

3. Pelaksanaan PMPI Online

Merujuk surat Inspektur Jenderal yang disampaikan kepada Pimpinan Satuan Kerja dengan surat Nomor ITJ.OT.02.02-04 tanggal 7 Juli 2022 hal Pemberitahuan Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 melalui mekanisme *online* pada website <http://itjen.kemerkumham.go.id> tanggal 25 Juli s.d 30 September 2022. Tahun 2022 ini sama dengan pelaksanaan PMPI Tahun 2021 bahwa responden PMPI Internal tidak dibatasi/ditentukan respondennya per unit utama, per kanwil dan per UPT atas arahan pimpinan Inspektorat Jenderal dan atas masukan dari Tim Peneliti Balitbang Hukum dan HAM serta atas masukan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, untuk responden tidak dibatasi dengan maksud agar setiap pegawai mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi mengisi survei PMPI dimaksud. PMPI dilaksanakan melalui 2 mekanisme pengukuran yaitu survei PMPI Internal untuk mengukur tingkat persepsi integritas pegawai Kementerian Hukum dan HAM serta PMPI eksternal untuk mengukur tingkat persepsi integritas atas layanan yang diberikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Responden PMPI internal adalah pegawai Kemenkumham dan responden PMPI eksternal adalah masyarakat/pengguna layanan Kemenkumham. Indikator survei sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman PMPI sebagai berikut:

Kuesioner pada Hal 11 sd 21, Buku PMPI

RESPONDEN INTERNAL	
Budaya Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses Data Sulit b. Sarat Kepentingan Pribadi c. Adanya calo d. Perlakuan SARA e. Perintah Atasan Tidak Sesuai Aturan f. Suap/gratifikasi g. Adanya honor tidak resmi h. Perlakuan buruk atasan kepada bawahan yang menolak perintah
Sistem Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi anti korupsi/pungutan liar b. Sistem Pencegahan Korupsi/pungutan liar c. Penindakan pelaku korupsi/pungutan liar d. Perlindungan pelapor
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Pegawai sarat KKN b. Mutasi dan Promosi Karir sarat KKN c. Kesempatan Pengembangan Kompetensi SDM sarat KKN
Pengelolaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelewengan Anggaran b. Penyelewengan Pengadaan Barang dan Jasa c. Penggunaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Perencanaan d. Proyek Fiktif e. Penyelewengan Perjalanan Dinas f. Pemotongan Honor Tidak Sah

Kuesioner pada Hal 22 sd 28, Buku PMPI

RESPONDEN EKSTERNAL (PENGGUNA LAYANAN)	
Budaya Integritas Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Sulit Didapat b. Prosedur Sulit c. Layanan Tidak Sesuai Prosedur d. Pelayanan Diskriminatif e. Kampanye Anti Korupsi f. Pengaduan Pungutan Liar dan/atau Korupsi g. Perlindungan Pelapor h. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Terkait Pungutan Liar dan/atau Korupsi
Budaya Integritas Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak Jujur b. Sarat Kepentingan Pribadi c. Menyalahi Wewenang d. Adanya Suap/gratifikasi e. Adanya Pungutan Liar / Pemerasan f. Pelayanan Publik Tidak Baik g. Keberadaan Calo

4. Data Responden Survei PMPI Online Tahun 2022

METODOLOGI SURVEY PELAKSANAAN PMPI ONLINE		Questioner menggunakan aplikasi pada website http://www.itjen.kemenkumham.go.id			
		Pelaksanaan survei online 25 Juli s.d 30 September 2022			
		Responden Internal sebanyak 28501 pegawai Kemenkumham Kanwil yang tidak ikut berpartisipasi yaitu Kanwil NTB dan Kanwil Papua			
		Responden Eksternal sebanyak 4209 pengguna layanan Kemenkumham			
		<table border="0"> <tr> <td>Total Responden Internal 28501 pegawai</td> <td>43,8% dari total target 65064 (data simpeg per 15 Nov 2022)</td> </tr> <tr> <td>Total Responden Eksternal 4209 pengguna layanan</td> <td>70,15% dari total target 6000</td> </tr> </table>	Total Responden Internal 28501 pegawai	43,8% dari total target 65064 (data simpeg per 15 Nov 2022)	Total Responden Eksternal 4209 pengguna layanan
Total Responden Internal 28501 pegawai	43,8% dari total target 65064 (data simpeg per 15 Nov 2022)				
Total Responden Eksternal 4209 pengguna layanan	70,15% dari total target 6000				

5. Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) INTERNAL

5.1) Sebaran responden internal persatuan kerja, diikuti oleh sebanyak 34.586 pegawai yaitu 1836 pegawai Unit Eselon I dan 30.914 pegawai Kantor Wilayah serta UPT, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

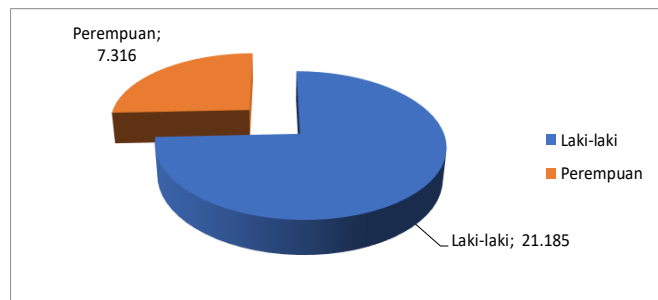
REKAPITULASI RESPONDEN SURVEI PERSEPSI SATKER 2022			
WILAYAH		UNIT_UTAMA	
No	KELOMPOK	UNIT KERJA / SATKER	TOTAL RESPONDEN
1.		MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	31
2.		STAF KHUSUS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
3.		STAF AHLI	
4.		SEKRETARIAT JENDERAL	69
5.		INSPEKTORAT JENDERAL	138
6.		DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	33
7.		DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	41
8.		DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	7
9.		DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	65
10.		DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	3
11.		DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	50
12.		BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	58
13.		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	126
14.		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	168
		Total Responden	789

REKAPITULASI RESPONDEN SURVEI PERSEPSI SATKER 2022			
WILAYAH			
No	KELOMPOK	UNIT KERJA / SATKER	TOTAL RESPONDEN
1.		UNIT_UTAMA	789
2.		ACEH	516
3.		BALI	597
4.		BANGKA_BELITUNG	553
5.		BANTEN	484
6.		BENGKULU	147
7.		DI_YOGYAKARTA	1.054
8.		DKI_JAKARTA	3.393
9.		GORONTALO	475
10.		JAMBI	1.211
11.		JAWA_BARAT	1.980
12.		JAWA_TENGAH	1.524
13.		JAWA_TIMUR	928
14.		KALIMANTAN_BARAT	1.269
		Total Responden	28.501

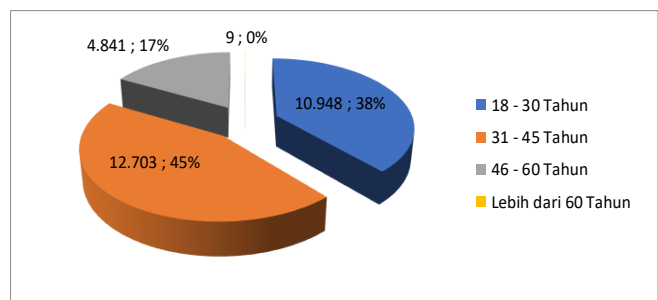
■ Hanya di Kanwil Sulawesi Utara tidak ada pegawai yang berpartisipasi mengisi survei PMPI internal, sedangkan surat Inspektur Jenderal tentang Pemberitahuan PMPI Tahun 2021 telah disampaikan melalui Sumaker. Serta saat sosialisasi Teknis Tata Cara Pengisian Survei PMPI online oleh ITJEN pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan 950 peserta meliputi perwakilan 11 Unit Utama, 31 Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis. Kanwil dan UPT yang tidak hadir adalah Kanwil beserta UPT pada Kanwil NTB dan Papua.

5.2) Rekapitulasi Responden PMPI Internal berdasar Jenis Kelamin, Masa Kerja, Golongan dan usia

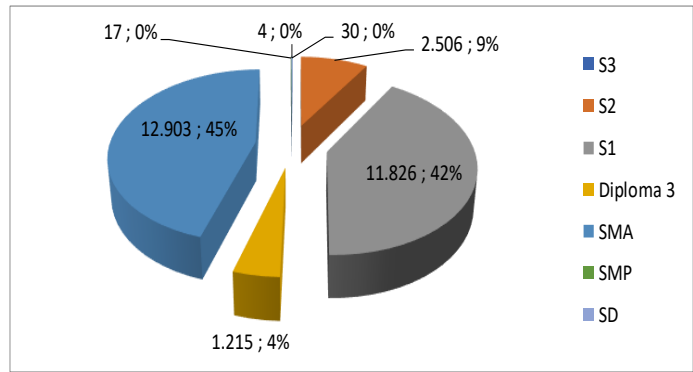
No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	21.185
2	Perempuan	7.316
Total :		28.501



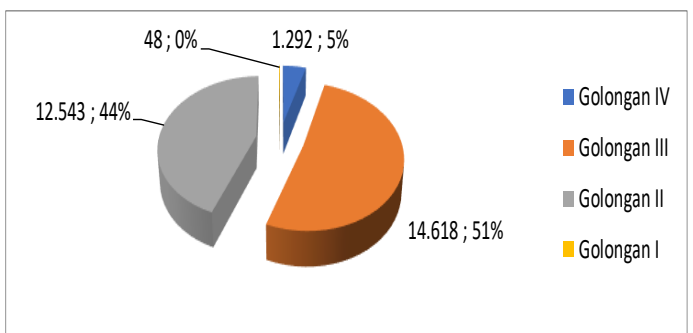
No	Range Usia	Jumlah
1	18 - 30 Tahun	10.948
2	31 - 45 Tahun	12.703
3	46 - 60 Tahun	4.841
4	Lebih dari 60 Tahun	9
Total :		28.501



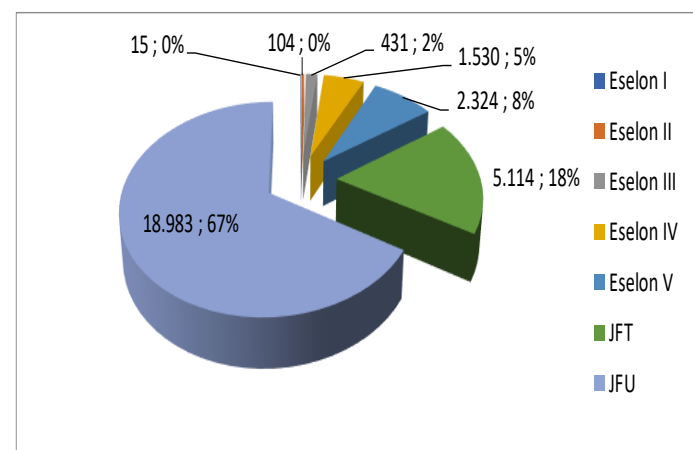
No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	30
2	S2	2.506
3	S1	11.826
4	Diploma 3	1.215
5	SMA	12.903
6	SMP	17
7	SD	4
Total :		28.501



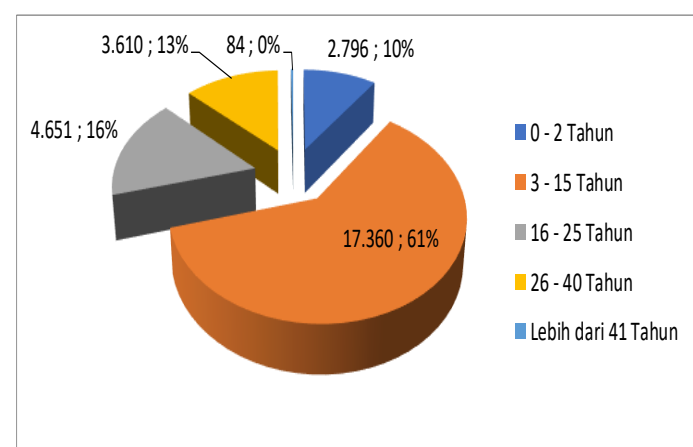
No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	1.292
2	Golongan III	14.618
3	Golongan II	12.543
4	Golongan I	48
Total :		28.501



No	Eselon	Jumlah
1	Eselon I	15
2	Eselon II	104
3	Eselon III	431
4	Eselon IV	1.530
5	Eselon V	2.324
6	JFT	5.114
7	JFU	18.983
Total :		28.501



No	Masa Kerja	Jumlah
1	0 - 2 Tahun	2.796
2	3 - 15 Tahun	17.360
3	16 - 25 Tahun	4.651
4	26 - 40 Tahun	3.610
5	Lebih dari 41 Tahun	84
Total :		28.501



5.3) Rekapitulasi Nilai Survei PMPI Internal Per Unit Utama, sebagai berikut :

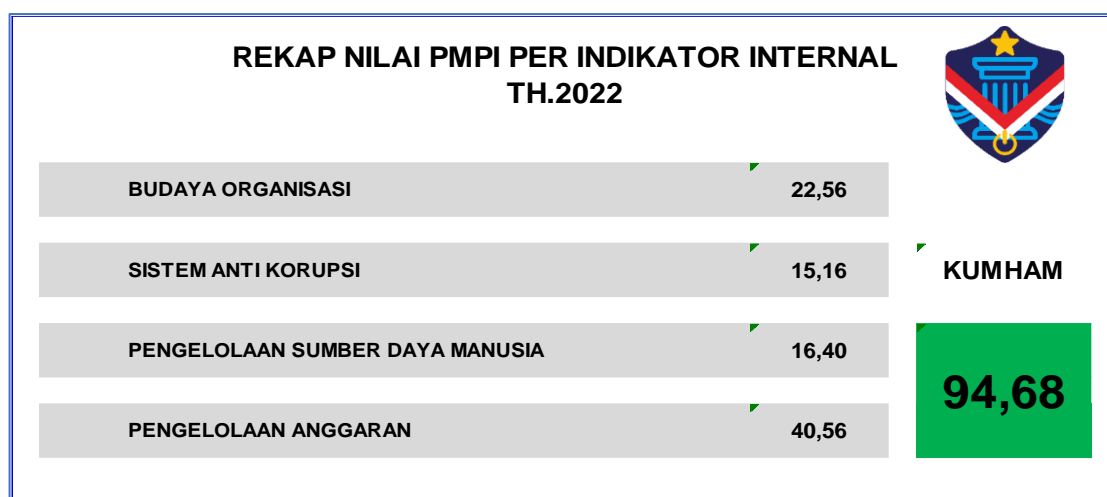
REKAPITULASI NILAI SURVEI PERSEPSI SATKER 2022



No	UNIT KERJA / SATKER	TOTAL RESPONDEN	Budaya Organisasi	Sistem Anti Korupsi	Pengelolaan SDM	Pengelolaan Anggaran	Total Nilai	Nilai Rata-rata
1.	UNIT_UTAMA	789	708,26	708,26	708,26	708,26	71.729,67	90,91
2.	ACEH	516	483,62	483,62	483,62	483,62	48.705,25	94,39
3.	BALI	597	575,32	575,32	575,32	575,32	57.788,49	96,80
4.	BANGKA_BELITUNG	553	522,15	522,15	522,15	522,15	52.574,54	95,07
5.	BANTEN	484	468,45	468,45	468,45	468,45	46.970,45	97,05
6.	BENGKULU	147	137,15	137,15	137,15	137,15	13.707,06	93,25
7.	DI_YOGYAKARTA	1.054	1.026,92	1.026,92	1.026,92	1.026,92	102.670,46	97,41
8.	DKI_JAKARTA	3.393	3.102,80	3.102,80	3.102,80	3.102,80	314.714,21	92,75
9.	GORONTALO	475	446,93	446,93	446,93	446,93	44.947,39	94,63
10.	JAMBI	1.211	1.149,22	1.149,22	1.149,22	1.149,22	115.681,38	95,53
11.	JAWA_BARAT	1.980	1.881,94	1.881,94	1.881,94	1.881,94	189.224,71	95,57
12.	JAWA_TENGAH	1.524	1.420,95	1.420,95	1.420,95	1.420,95	143.234,23	93,99
13.	JAWA_TIMUR	928	874,27	874,27	874,27	874,27	88.099,20	94,93
14.	KALIMANTAN_BARAT	1.269	1.179,04	1.179,04	1.179,04	1.179,04	119.043,55	93,81
15.	KALIMANTAN_SELATAN	1.459	1.354,98	1.354,98	1.354,98	1.354,98	136.829,92	93,78
16.	KALIMANTAN_TENGAH	937	873,64	873,64	873,64	873,64	88.367,01	94,31
17.	KALIMANTAN_TIMUR	1.102	1.050,33	1.050,33	1.050,33	1.050,33	105.562,42	95,79
18.	KEPULAUAN_RIAU	1.280	1.206,89	1.206,89	1.206,89	1.206,89	121.399,54	94,84
19.	LAMPUNG	323	308,84	308,84	308,84	308,84	31.072,14	96,20
20.	MALUKU	526	482,40	482,40	482,40	482,40	48.684,26	92,56
21.	MALUKU_UTARA	637	591,22	591,22	591,22	591,22	59.737,17	93,78
22.	NUSA_TENGGARA_BARAT	-	-	-	-	-	-	0,00
23.	NUSA_TENGGARA_TIMUR	1.118	1.062,69	1.062,69	1.062,69	1.062,69	106.522,73	95,28
24.	PAPUA	-	-	-	-	-	-	0,00
25.	PAPUA_BARAT	82	74,59	74,59	74,59	74,59	7.573,54	92,36
26.	RIAU	206	194,67	194,67	194,67	194,67	19.545,69	94,88
27.	SULAWESI_BARAT	186	174,41	174,41	174,41	174,41	17.554,51	94,38
28.	SULAWESI_SELATAN	344	318,60	318,60	318,60	318,60	32.153,52	93,47
29.	SULAWESI_TENGAH	124	115,36	115,36	115,36	115,36	11.553,21	93,17
30.	SULAWESI_TENGGARA	715	670,83	670,83	670,83	670,83	67.585,62	94,53
31.	SULAWESI_UTARA	230	214,79	214,79	214,79	214,79	21.680,82	94,26
32.	SUMATERA_BARAT	73	66,53	66,53	66,53	66,53	6.797,95	93,12
33.	SUMATERA_SELATAN	1.173	1.106,59	1.106,59	1.106,59	1.106,59	111.303,54	94,89
34.	SUMATERA_UTARA	3.064	2.941,20	2.941,20	2.941,20	2.941,20	295.210,44	96,35
35.	LAIN-LAIN	2	1,90	1,90	1,90	1,90	189,88	94,94
		-	-	-	-	-	-	
Total Responden		28.501						94,68

■ Ket : Data tidak valid dikarenakan kesalahan responden memilih nama satuan kerja

Nilai/Indeks rata-rata persepsi integritas internal pada unit utama sebesar 83,86 dengan indikator terendah masih sama dengan hasil survei PMPI Tahun 2019 dan Tahun 2020 yaitu pada indikator Sistem Anti Korupsi (13,85). Berdasarkan pada matrik tersebut nilai rata-rata per eselon I tinggi bukan berarti paling baik, namun dikarenakan faktor pembagi yaitu jumlah respondennya sedikit.



Dari data tersebut bahwa hasil akhir Indeks Persepsi Integritas Internal diperoleh sebesar 94,68.

Dan perbandingan 4 (empat) indikator survei PMPI Internal di peroleh nilai terendah adalah pada indikator Sistem Anti Korupsi (15,16). Nilai indikator Sistem Anti Korupsi tersebut naik sebesar 0.24 dari tahun 2021 (14,92) Hal tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun telah dilakukan sosialisasi anti korupsi, namun masih terdapat pegawai :

- a. yang belum memahami tentang sistem anti korupsi
- b. yang belum mengetahui bahwa Kemenkumham telah ada sistem pencegahan korupsi
- c. yang tidak percaya bahwa sistem anti korupsi di Kemenkumham itu efektif mencegah dan mampu membuat pegawai menghindari korupsi
- d. yang tidak percaya bila ada pegawai yang berbuat KKN akan diproses secara administrasi dan/ atau hukum
- e. yang melihat/ mendengar/ melaporkan pelaku KKN di Kemenkumham
- f. tidak percaya pegawai yang melaporkan praktik korupsi di instansi Anda akan mendapat perlindungan
- g. yang tidak tahu bahwa Kemenkumham terdapat mekanisme perlindungan pelapor


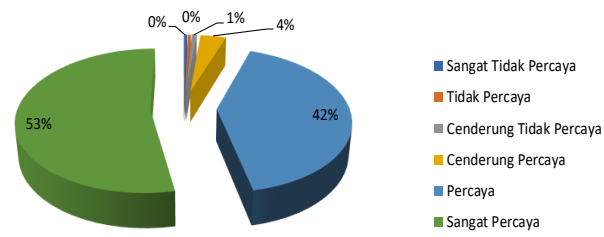

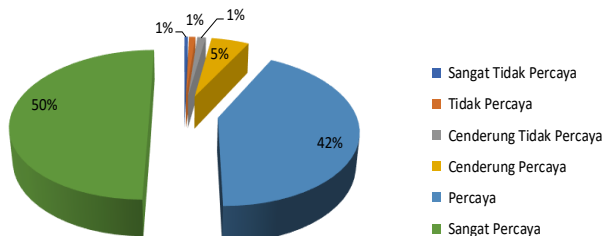
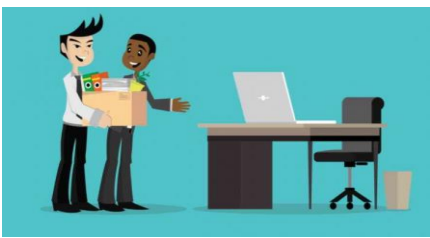
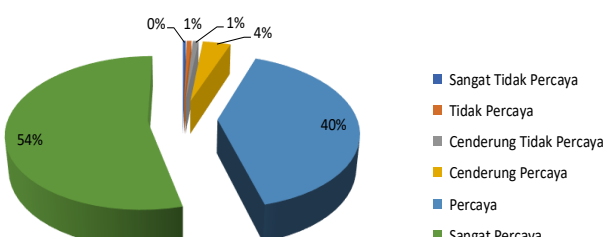
Dari kelemahan tersebut agar dilakukan sosialisasi Sistem Anti Korupsi secara berkala kepada seluruh pegawai sehingga pegawai bukan hanya mengetahui tapi juga memahami sistem anti korupsi di Kementerian Hukum dan HAM.

Penilaian kesimpulan survei PMPI Internal, sebagai berikut :

- Bahwa secara umum pegawai menilai Kemenkumham adalah organisasi yang memiliki Integritas sangat baik dari tahun ke tahun dan percaya bahwa survei PMPI dapat memberi masukan untuk mencegah korupsi pada Kemenkumham. Dari 28501 pegawai, terdapat :
- 534 (0.019%) Pegawai yang selama satu tahun terakhir pernah mendengar/melihat pegawai menerima suap / gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar, berkisar Rp.5jt sd Rp.10jt.
- 715 (0,025%) pegawai pernah melihat/ mendengar ada calo yang mengurus sesuatu
- 282 (0.009%) pegawai pernah melihat/ mendengar atasan menerima honor tidak resmi
- 500 (0,017%) pegawai melihat/ mendengar seseorang memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) terkait dengan kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya).

5.4) *Highlight* per indikator Hasil PMPI Internal dari responden sebanyak 32750 pegawai

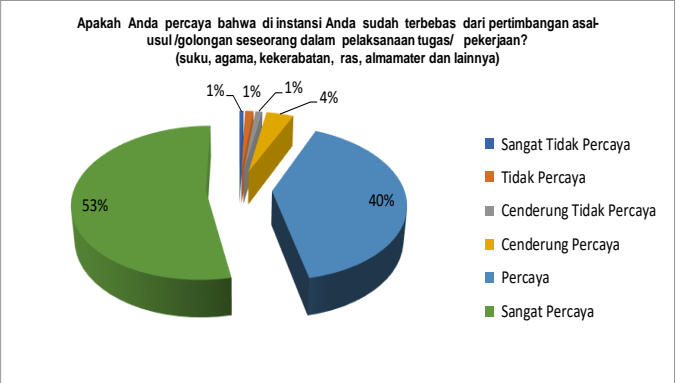
5.4.1) Budaya Organisasi

<p>1 Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda telah menjunjung tinggi transparansi pada saat menjalankan tugas? (mengedepankan keterbukaan/ kemudahan akses untuk pihak internal atau eksternal atas data/informasi yang secara aturan diperbolehkan)</p>	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		RESPONDEN
	136	116	199	1.054	11.852	15.144		28.501
	<p>Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda telah menjunjung tinggi transparansi pada saat menjalankan tugas? (mengedepankan keterbukaan/ kemudahan akses untuk pihak internal atau eksternal atas data/informasi yang secara aturan diperbo</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Sangat Tidak Percaya ■ Tidak Percaya ■ Cenderung Tidak Percaya ■ Cenderung Percaya ■ Percaya ■ Sangat Percaya 							
<p>2 Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda terbebas dari kepentingan pribadi pada saat melaksanakan tugas?</p>	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		RESPONDEN
	134	251	337	1.494	12.060	14.225		28.501
	<p>Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda terbebas dari kepentingan pribadi pada saat melaksanakan tugas?</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Sangat Tidak Percaya ■ Tidak Percaya ■ Cenderung Tidak Percaya ■ Cenderung Percaya ■ Percaya ■ Sangat Percaya 							
<p>3 Apakah Anda percaya bahwa instansi Anda sudah terbebas dari calo/perantara untuk urusan tertentu seperti perijinan, keputusan, atau pelayanan?</p>	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		RESPONDEN
	114	181	227	1.093	11.487	15.399		28.501
	<p>Apakah Anda percaya bahwa instansi Anda sudah terbebas dari calo/perantara untuk urusan tertentu seperti perijinan, keputusan, atau pelayanan?</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Sangat Tidak Percaya ■ Tidak Percaya ■ Cenderung Tidak Percaya ■ Cenderung Percaya ■ Percaya ■ Sangat Percaya 							

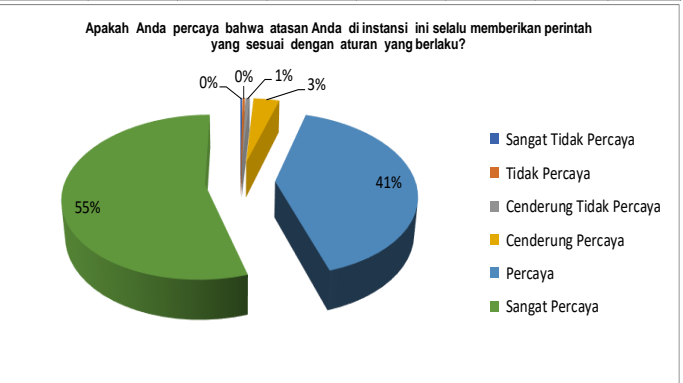
4	Dalam 12 bulan terakhir berapa kali Anda pernah melihat/ mendengar ada calo yang mengurus sesuatu di instansi Anda	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		146	21	65	169	314	27.786		28.501



5	Apakah Anda percaya bahwa di instansi Anda sudah terbebas dari pertimbangan asal-usul /golongan seseorang dalam pelaksanaan tugas/ pekerjaan? (suku, agama, kekerabatan, ras, almamater dan lainnya)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		164	348	282	1.127	11.411	15.169		28.501



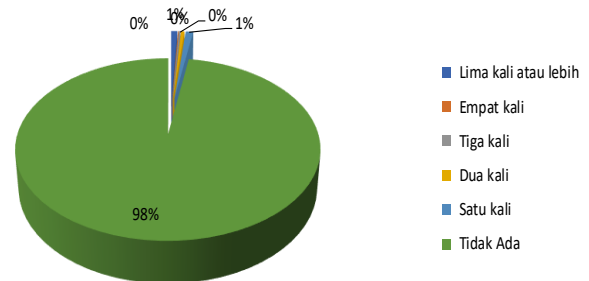
6	Apakah Anda percaya bahwa atasan Anda di instansi ini selalu memberikan perintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		69	85	163	1.007	11.568	15.609		28.501



7	Dalam 12 bulan terakhir berapa kali Anda melihat/mendengar atasan Anda di instansi ini memberi perintah yang melanggar aturan kepada bawahan?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		228	24	57	130	282	27.780		28.501



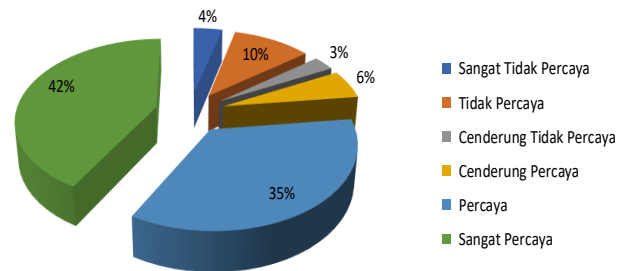
Dalam 12 bulan terakhir berapa kali Anda melihat/mendengar atasan Anda di instansi ini memberi perintah yang melanggar aturan kepada bawahan?



8	Apakah Anda percaya jika pegawai menolak perintah atasan untuk melanggar aturan, tetap akan mendapat perlakuan baik (bebas dari sanksi, dikucilkan, karir terhambat dan lainnya)?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		1.113	3.023	822	1.611	9.979	11.953		28.501



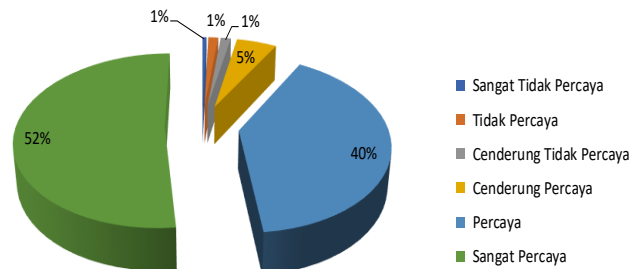
Apakah Anda percaya jika pegawai menolak perintah atasan untuk melanggar aturan, tetap akan mendapat perlakuan baik (bebas dari sanksi, dikucilkan, karir terhambat dan lainnya)?



9	Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda terbebas dari penerimaan suap/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		146	364	368	1.467	11.439	14.717		28.501



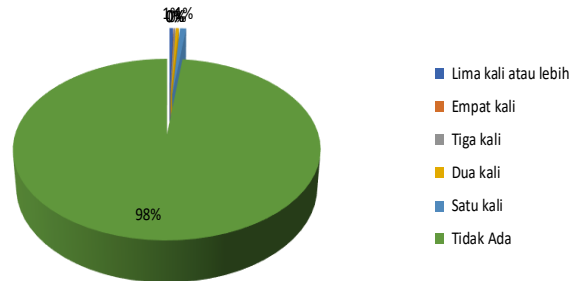
Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda terbebas dari penerimaan suap/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar?



10 Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar pegawai di instansi Anda menerima suap / gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
	137	12	42	111	232	27.967		28.501



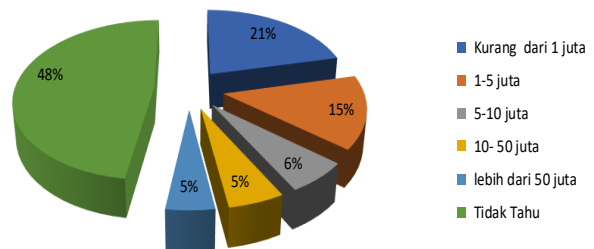
Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar pegawai di instansi Anda menerima suap / gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar?



11 Sepengetahuan Anda, berapa nilai pemberian suap/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) tersebut? (jika lebih dari sekali sebutkan nilai yang terbesar;	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10- 50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
	114	78	33	29	25	255		534

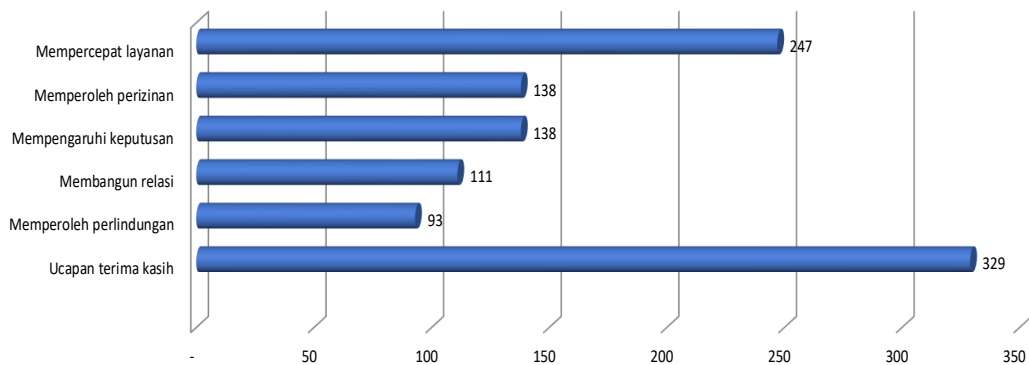


Sepengetahuan Anda, berapa nilai pemberian suap/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) tersebut?



BE BF BG BH BI BJ

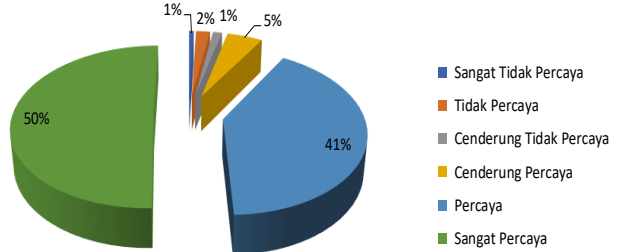
12 Sepengetahuan Anda, untuk keperluan apa pemberian hadiah tersebut diberikan? (jawaban bisa lebih dari satu)	Mempercepat layanan	Memperoleh perizinan	Mempengaruhi keputusan	Membangun relasi	Memperoleh perlindungan	Ucapan terima kasih		
	247	138	138	111	93	329		1.056



13 Apakah Anda percaya bahwa atasan Anda di instansi ini akan menolak menerima honor tidak resmi atau honor dari luar instansi yang tidak sesuai peraturan?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
	179	542	353	1.375	11.672	14.380		28.501



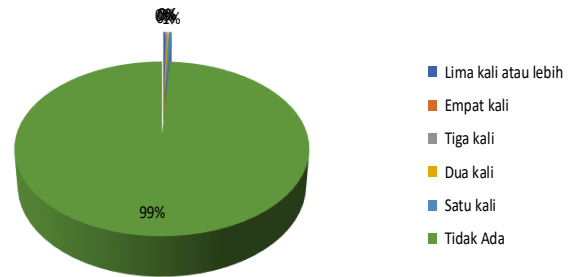
Apakah Anda percaya bahwa atasan Anda di instansi ini akan menolak menerima honor tidak resmi atau honor dari luar instansi yang tidak sesuai peraturan?



14 Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda pernah melihat/mendengar atasan Anda di instansi ini menerima honor tidak resmi?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
	81	15	27	48	111	28.219		28.501



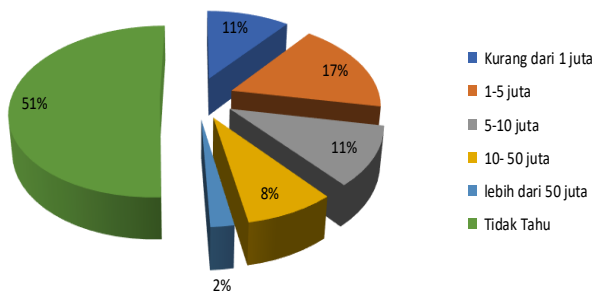
Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda pernah melihat/mendengar atasan Anda di instansi ini menerima honor tidak resmi?



15 Sepengetahuan Anda, berapa nilai pemberian honor tidak resmi tersebut?	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10-50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
	30	49	31	23	6	143		282

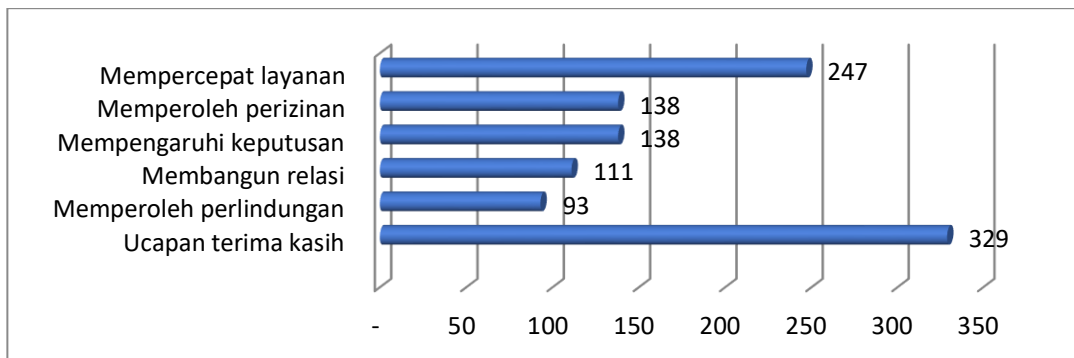


Sepengetahuan Anda, berapa nilai pemberian honor tidak resmi tersebut?



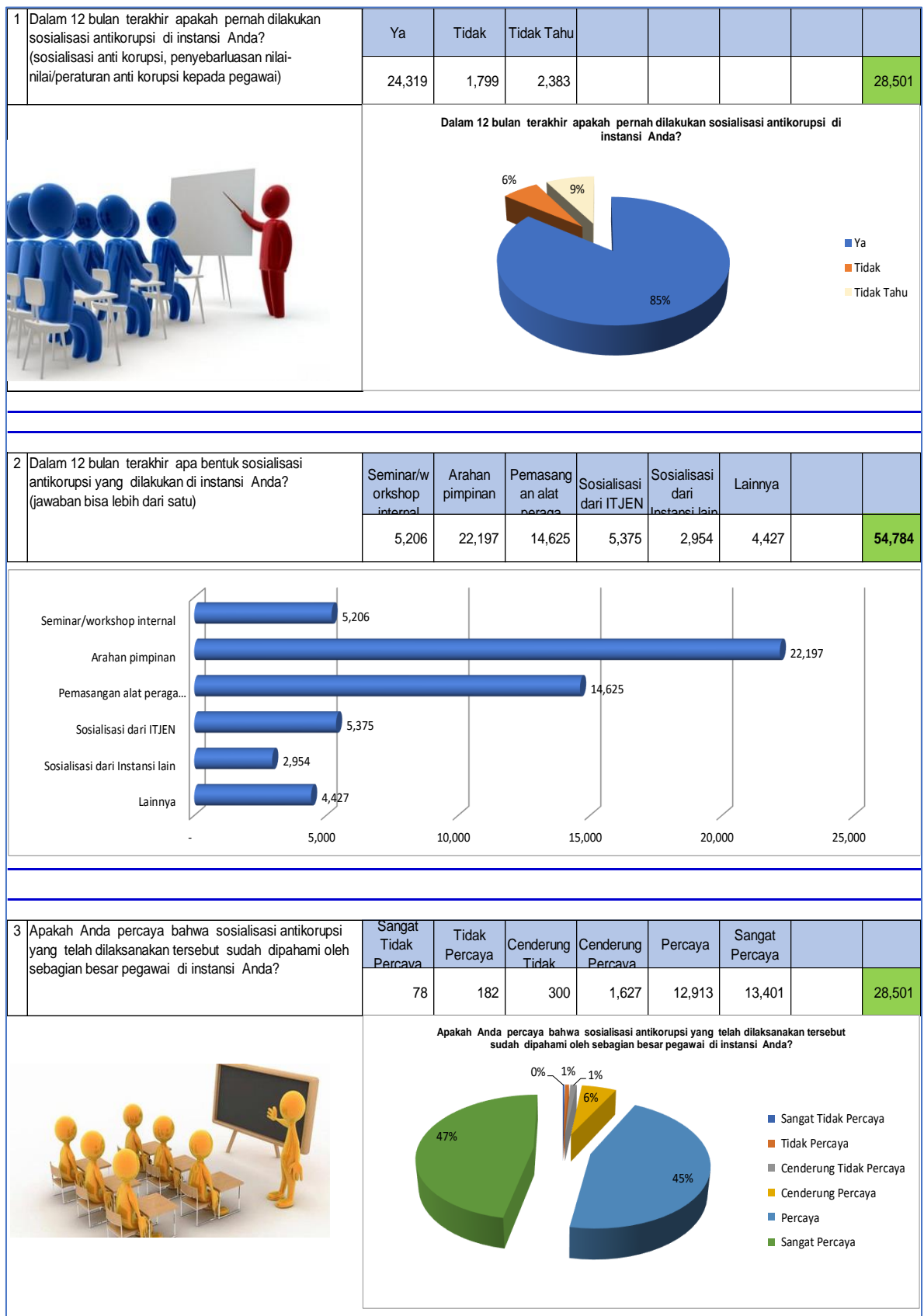
Dari hasil survei diatas bahwa terdapat pegawai sebanyak :

- a) 1,1% menjawab bahwa pegawai Kemenkumham tidak menjunjung tinggi transparansi pada saat menjalankan tugas dengan mengedepankan keterbukaan/kemudahan akses untuk pihak internal atau eksternal atas data/informasi yang secara aturan diperbolehkan.
- b) 1,3% menjawab bahwa pegawai Kemenkumham tidak terbebas dari kepentingan pribadi pada saat melaksanakan tugas.
- c) 1,1% menjawab bahwa Kemenkumham belum terbebas dari calo/perantara untuk urusan tertentu seperti perijinan, keputusan, atau pelayanan.
- a) 146 orang pernah lebih dari 5 kali melihat/ mendengar ada calo yang mengurus sesuatu di Kemenkumham.
- d) 1,8% sangat tidak percaya dan 348 tidak percaya bahwa Kemenkumham sudah terbebas dari pertimbangan asal-usul /golongan seseorang dalam pelaksanaan
- e) 14,5% menjawab bahwa jika pegawai menolak perintah atasan untuk melanggar aturan, tetap akan mendapat perlakuan baik (bebas dari sanksi, dikucilkan, karir terhambat dan lainnya).
- f) 1,8% menjawab bahwa Kemenkumham tidak terbebas dari penerimaan suap/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar.
- g) 137 melihat/mendengar pegawai di instansi Anda menerima suap / gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar, berkisar antara kurang dari satu juta rupiah s.d. lebih dari lima juta rupiah, dan paling banyak menjawab untuk ucapkan terima kasih sebagai berikut :



- h) 2,5% menjawab bahwa atasan di Kemenkumham akan menolak menerima honor tidak resmi atau honor dari luar instansi yang tidak sesuai peraturan.
- i) 81 melihat/ mendengar atasan Anda di instansi ini menerima honor tidak resmi, antara satu juta rupiah hingga lebih dari lima puluh juta rupiah.

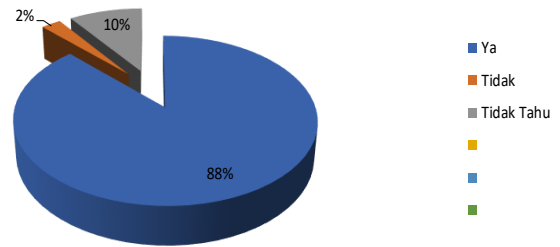
5.4.2) Sistem Anti Korupsi



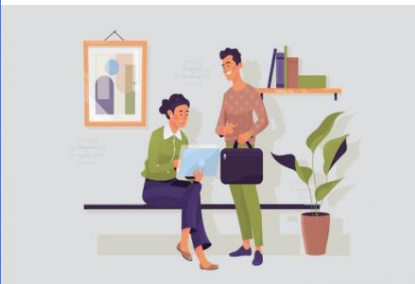
4	Sepengetahuan Anda, apakah sudah ada sistem pencegahan korupsi di instansi Anda?	Ya	Tidak	Tidak Tahu					
		25,018	735	2,748					28,501



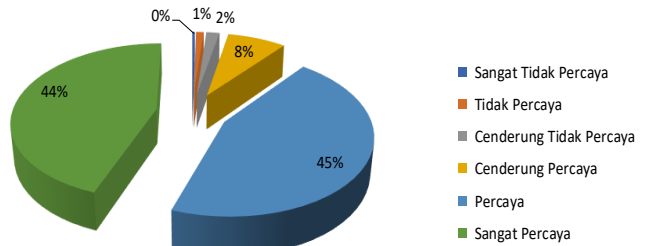
Sepengetahuan Anda, apakah sudah ada sistem pencegahan korupsi di instansi Anda?



5	Apakah Anda percaya bahwa sistem pencegahan korupsi yang ada di instansi Anda sudah efektif mencegah korupsi? (efektif mencegah/sistem tersebut mampu membuat pegawai menghindari korupsi)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		94	287	497	2,205	12,729	12,689		28,501



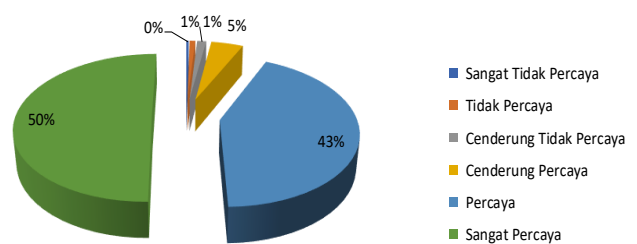
Apakah Anda percaya bahwa sistem pencegahan korupsi yang ada di instansi Anda sudah efektif mencegah korupsi?



6	Apakah Anda percaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi di instansi Anda akan diproses secara administrasi dan/ atau hukum?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		94	225	360	1,281	12,224	14,317		28,501



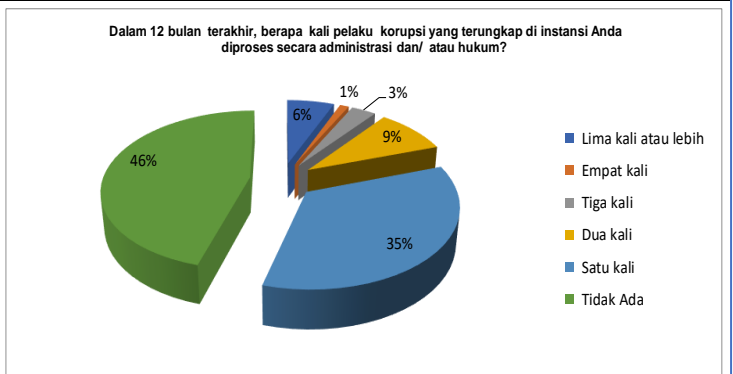
Apakah Anda percaya bahwa di instansi Anda sudah terbebas dari pertimbangan asal-usul/golongan seseorang dalam pelaksanaan tugas/ pekerjaan? (suku, agama, kekerabatan, ras, almamater dan lainnya)



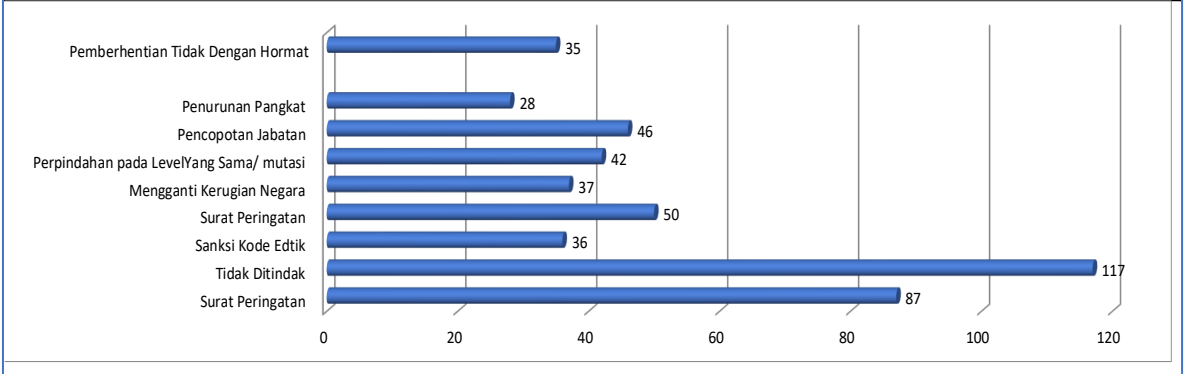
7	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar pelaku korupsi terungkap di instansi Anda?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		52	11	24	62	195	28,157		28,501



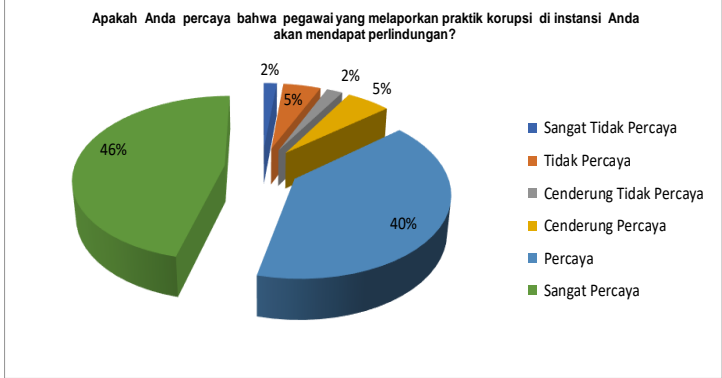
8	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali pelaku korupsi yang terungkap di instansi Anda diproses secara administrasi dan/atau hukum?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		21	4	11	32	119	157		344



9	Dalam 12 bulan terakhir apa bentuk sosialisasi antikorupsi yang	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	Penurunan Pangkat	Pencopotan Jabatan	Perpindahan pada Level Yang Sama/ mutasi	Mengganti Kerugian Negara	Surat Peringatan	Sanksi Kode Etik	Tidak Ditindak	Surat Peringatan
		35	28	46	42	37	50	36	117	87



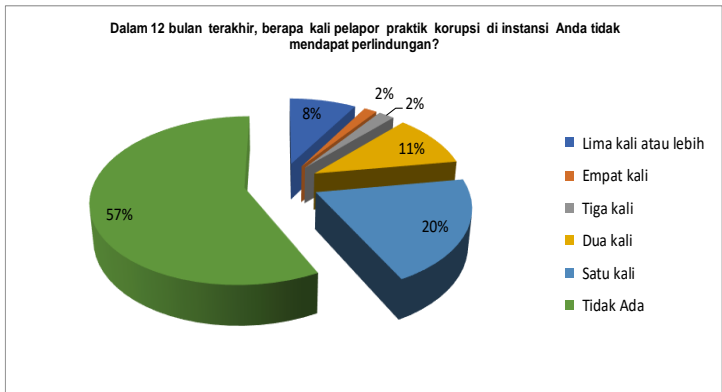
10	Apakah Anda percaya bahwa pegawai yang melaporkan praktik korupsi di instansi Anda akan mendapat perlindungan? (memperoleh perlindungan berupa bebas dari sanksi, tidak dikucilkan, karir dihambat dan lainnya)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		478	1,362	578	1,578	11,357	13,148		28,501



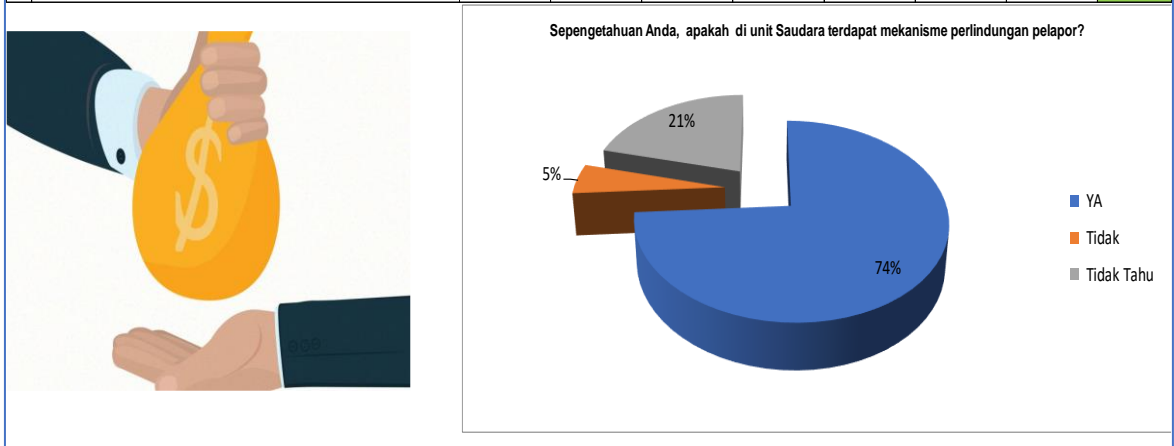
11	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda mendengar/melihat pegawai melaporkan praktik korupsi di instansi Anda?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		36	7	19	37	150	28,252		28,501



12	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali pelapor praktik korupsi di instansi Anda tidak mendapat perlindungan? (tidak memperoleh perlindungan namun mendapat sanksi dikucilkan, karir dihambat dan lainnya)?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		21	4	5	26	50	143		249

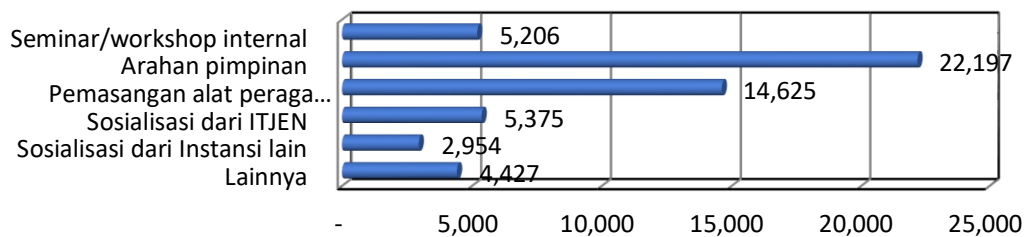


13) Sepengetahuan Anda, apakah di unit Saudara terdapat mekanisme perlindungan pelapor?	YA	Tidak	Tidak Tahu					
	21,084	1,436	5,981					28,501

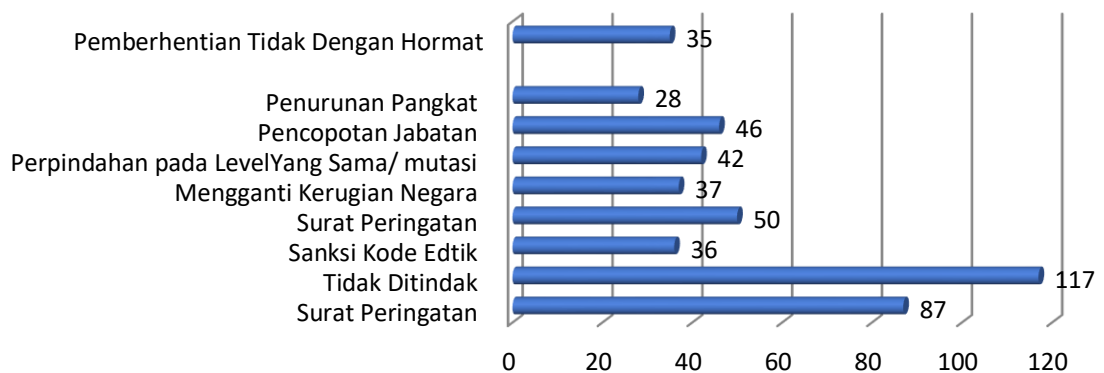


Dari hasil survei diatas bahwa terdapat pegawai sebanyak:

- a) Sebagian besar menjawab telah dilakukan sosialisasi anti korupsi, sosialisasi dipahami dan dilakukan dalam bentuk


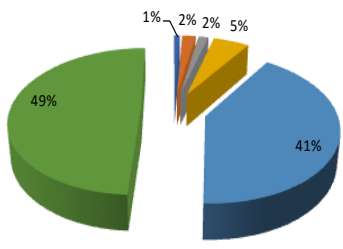

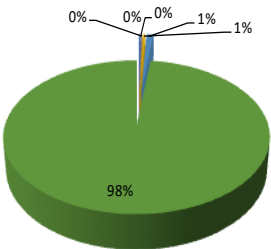


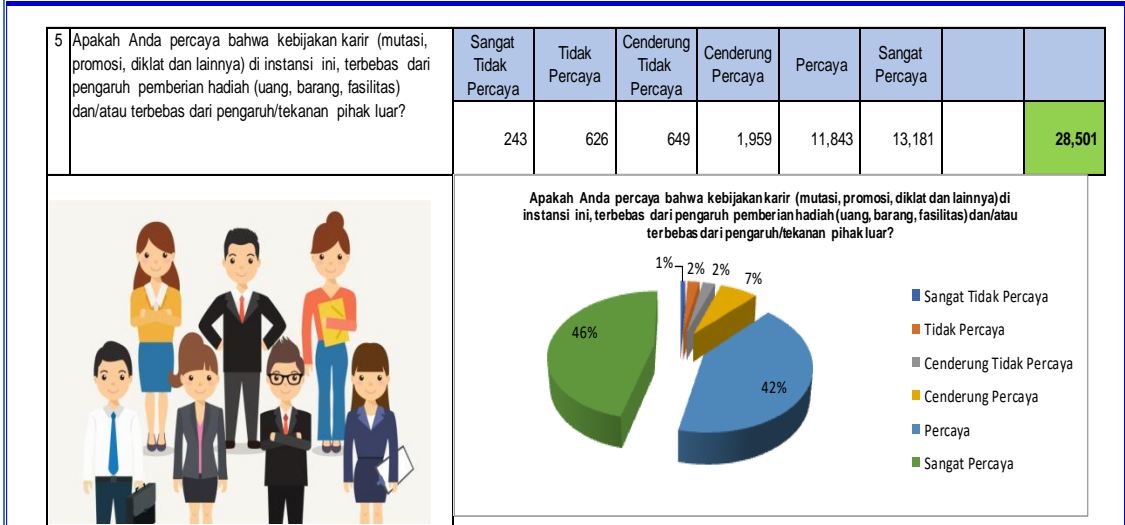
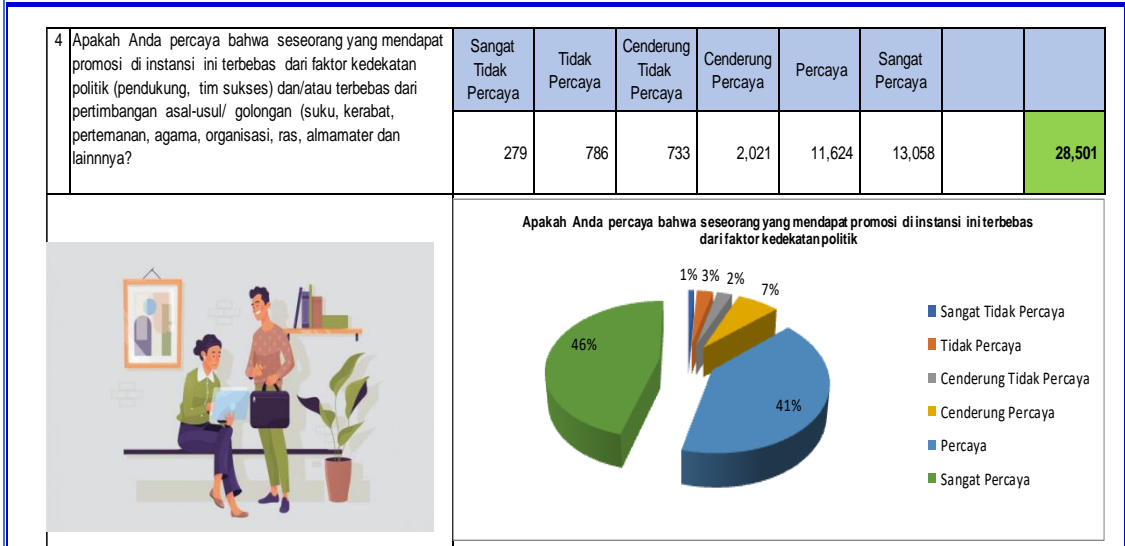
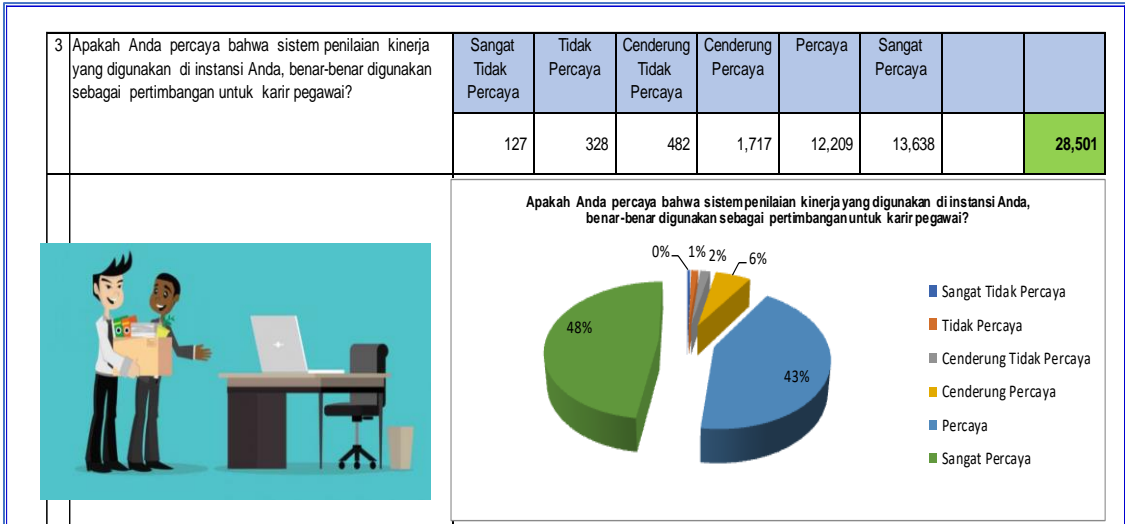
- b) Sebagian besar menjawab bahwa sudah ada system anti korupsi di kemenkumham, dan bahwa sistem pencegahan korupsi yang ada di instansi Anda sudah efektif mencegah korupsi.
- c) 3,7% menjawab bahwa pegawai yang melakukan korupsi di instansi Anda akan diproses secara administrasi dan/ atau hukum.
- d) 52 menjawab lebih dari 5 kali melihat/ mendengar pelaku korupsi terungkap
- e) 21 menjawab pelaku korupsi yang terungkap di instansi Anda diproses secara administrasi dan/atau hukum.
- f) Bentuk sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham sebagai berikut :




- g) 6,5% menjawab bahwa pegawai yang melaporkan praktik korupsi di instansi Anda akan mendapat perlindungan? (memperoleh perlindungan berupa bebas dari sanksi, tidak dikucilkan, karir dihambat dan lainnya).
- h) 21 menjawab lebih dari 5 kali berapa kali pelapor praktik korupsi di instansi Anda tidak mendapat perlindungan? (tidak memperoleh perlindungan namun mendapat sanksi dikucilkan, karir dihambat dan lainnya), walaupun mengetahui sudah terdapat mekanisme perlindungan pelapor.

5.4.3) Pengelolaan SDM

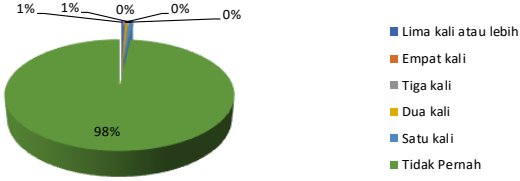
<p>1 Apakah Anda percaya bahwa di instansi ini seseorang bisa memperoleh keistimewaan saat seleksi penerimaan pegawai (termasuk honorer/PPNPN)? (Keistimewaan berupa kepastian diterima karena pengaruh pejabat, kekerabatan, menyuap dan lainnya)</p>	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		28,501
	<p>Apakah Anda percaya bahwa pegawai di instansi Anda telah menjunjung tinggi transparansi pada saat menjalankan tugas? (mengedepankan keterbukaan/ kemudahan akses untuk pihak internal atau eksternal atas data/informasi yang secara aturan diperbo)</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Sangat Tidak Percaya ■ Tidak Percaya ■ Cenderung Tidak Percaya ■ Cenderung Percaya ■ Percaya ■ Sangat Percaya 							
<p>2 Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/ mendengar seseorang memperoleh keistimewaan saat seleksi penerimaan pegawai di instansi Anda? (Keistimewaan berupa kepastian diterima karena pengaruh pejabat, kekerabatan, menyuap dan lainnya)</p>	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		28,501
	<p>Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/ mendengar seseorang memperoleh keistimewaan saat seleksi penerimaan pegawai di instansi Anda?</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Lima kali atau lebih ■ Empat kali ■ Tiga kali ■ Dua kali ■ Satu kali ■ Tidak Ada 							



6	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda pernah melihat/ mendengar seseorang di instansi ini memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) terkait dengan kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya)?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Pernah		
		130	18	42	85	225	28,001		28,501

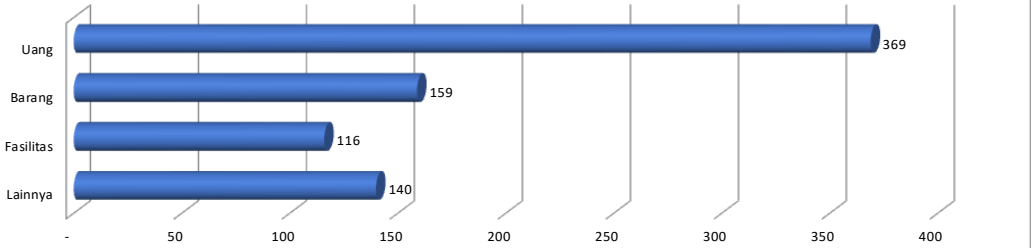


Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda pernah melihat/ mendengar seseorang di instansi ini memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) terkait dengan kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya)?



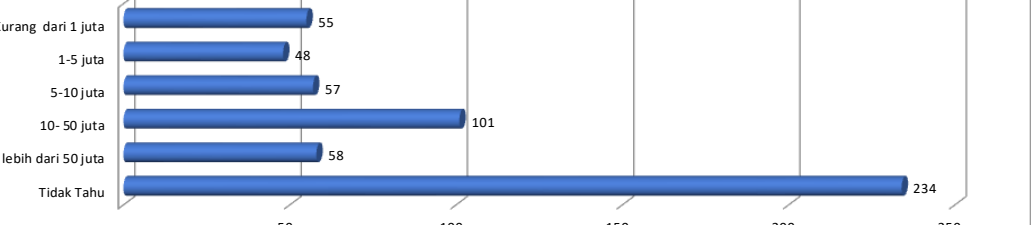
Kategori	Persentase
Lima kali atau lebih	0%
Empat kali	0%
Tiga kali	0%
Dua kali	1%
Satu kali	1%
Tidak Pernah	98%

7	Sepengetahuan Anda, apa bentuk pemberian untuk kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya) tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu);	Uang	Barang	Fasilitas	Lainnya				
		369	159	116	140				784



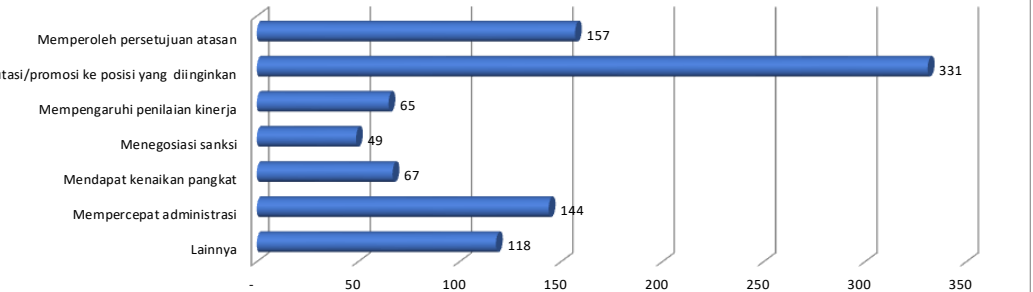
Bentuk Pemberian	Jumlah
Uang	369
Barang	159
Fasilitas	116
Lainnya	140

8	Sepengetahuan Anda, berapa nilai pemberian hadiah (uang, barang, fasilitas) untuk kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya) tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu)	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10- 50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
		55	48	57	101	58	234		553



Nilai Pemberian	Jumlah
Kurang dari 1 juta	55
1-5 juta	48
5-10 juta	57
10- 50 juta	101
lebih dari 50 juta	58
Tidak Tahu	234

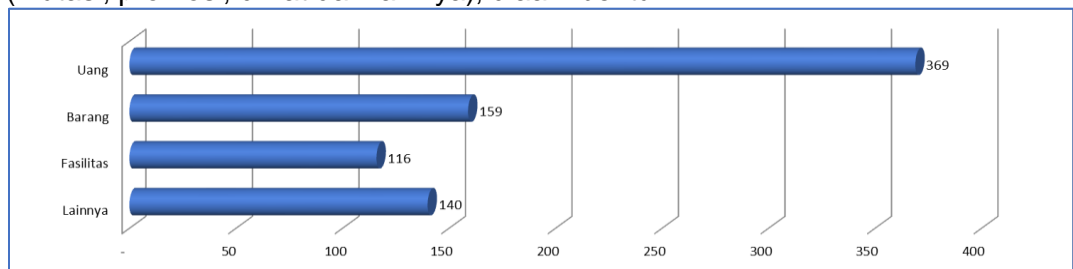
9	Sepengetahuan Anda, apa alasan pemberian hadiah (uang, barang, fasilitas) tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu)	Memperoleh persetujuan atasan	Mutasi/promosi ke posisi yang diinginkan	Mempengaruhi penilaian kinerja	Menegosiasi sanksi	Mendapat kenaikan pangkat	Mempercepat administrasi	Lainnya	
		157	331	65	49	67	144	118	931



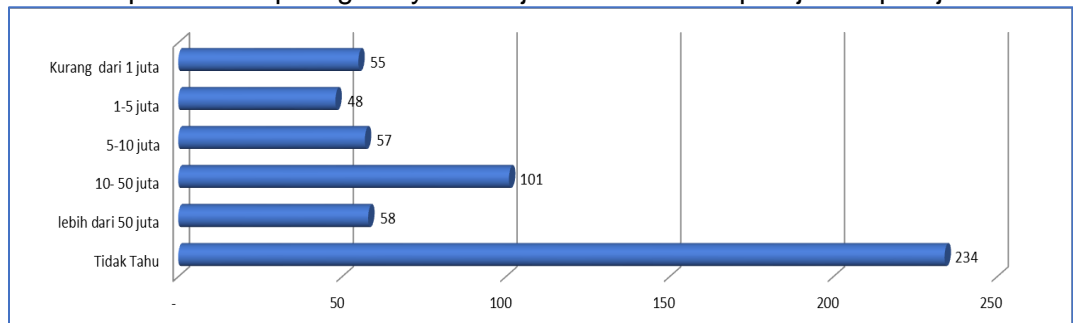
Alasan Pemberian	Jumlah
Memperoleh persetujuan atasan	157
Mutasi/promosi ke posisi yang diinginkan	331
Mempengaruhi penilaian kinerja	65
Menegosiasi sanksi	49
Mendapat kenaikan pangkat	67
Mempercepat administrasi	144
Lainnya	118

Dari hasil survei diatas bahwa terdapat pegawai sebanyak:

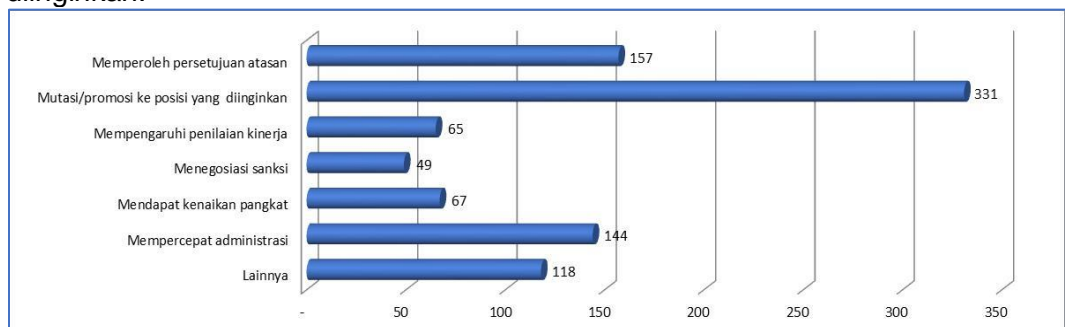
- a) 2,7% menjawab bahwa seseorang bisa memperoleh keistimewaan saat seleksi penerimaan pegawai (termasuk honorer/PPNP).
(Keistimewaan berupa kepastian diterima karena pengaruh pejabat, kekerabatan, menyuap dan lainnya).
- b) 41,37% menjawab pernah melihat/mendengar seseorang memperoleh keistimewaan saat seleksi penerimaan pegawai di Kemenkumham.
(Keistimewaan berupa kepastian diterima karena pengaruh pejabat, kekerabatan, menyuap dan lainnya).
- c) 1,6% berpendapat bahwa sistem penilaian kinerja di Kemenkumham, benar-benar digunakan sebagai pertimbangan untuk karir pegawai.
- d) 3,7% menjawab bahwa seseorang yang mendapat promosi di instansi ini terbebas dari faktor kedekatan politik (pendukung, tim sukses) dan/atau terbebas dari pertimbangan asal-usul/ golongan (suku, kerabat, pertemanan, agama, organisasi, ras, almamater dan lainnya).
- e) 3,1 % menjawab bahwa kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya) di Kemenkumham sudah terbebas dari pengaruh pemberian hadiah (uang, barang, fasilitas) dan/atau terbebas dari pengaruh/tekanan pihak luar.
- f) 130 orang lebih dari lima kali melihat/ mendengar seseorang di instansi ini memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) terkait dengan kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya), dalam bentuk :



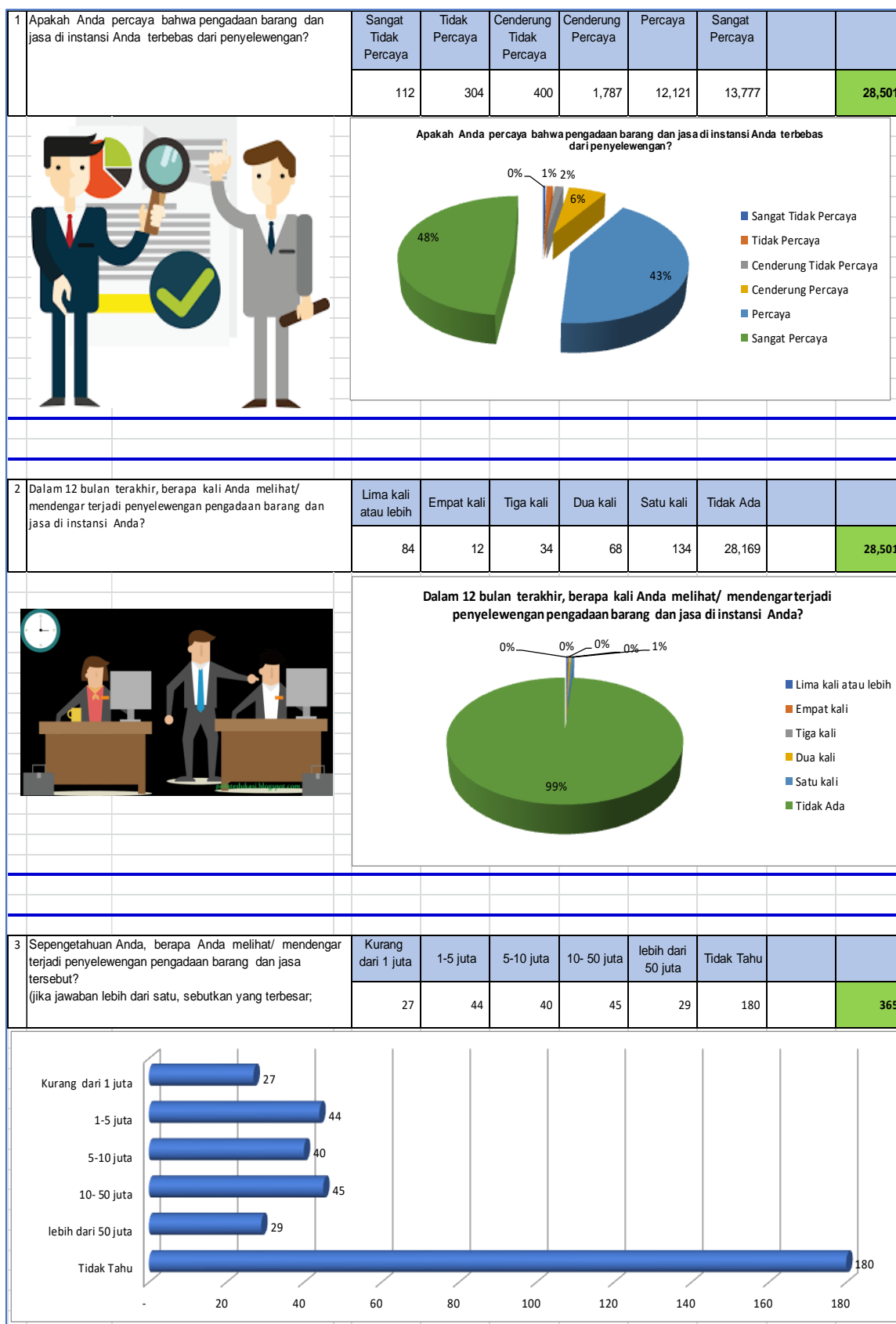
Dan nilai pemberian paling banyak menjawab berkisar Rp.10jt sd Rp.50jt.



Serta paling banyak menjawab untuk mempermudah mutasi/promosi yang diinginkan.



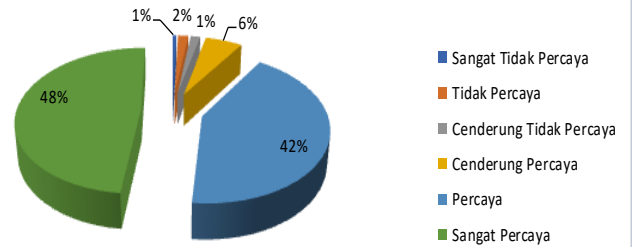
5.4.4) Pengelolaan Anggaran



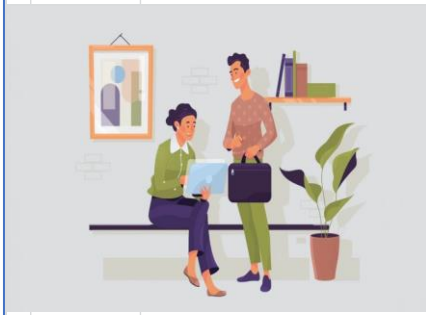
4	Apakah Anda percaya bahwa instansi Anda terbebas dari penggelembungan anggaran (mark up)?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		161	450	409	1,621	12,079	13,781		28,501



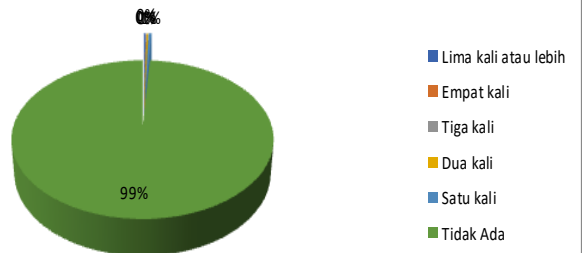
Apakah Anda percaya bahwa instansi Anda terbebas dari penggelembungan anggaran (markup)?



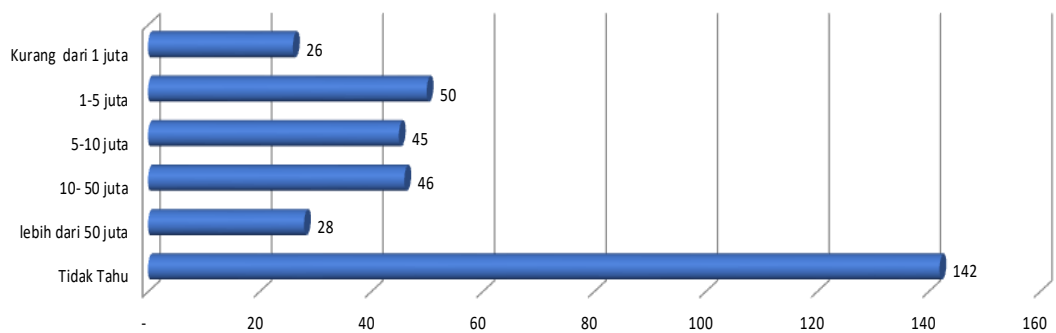
5	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar terjadinya penyelewengan anggaran dan/atau proyek fiktif dan/atau penggelembungan anggaran (mark up)?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		74	8	25	53	135	28,206		28,501



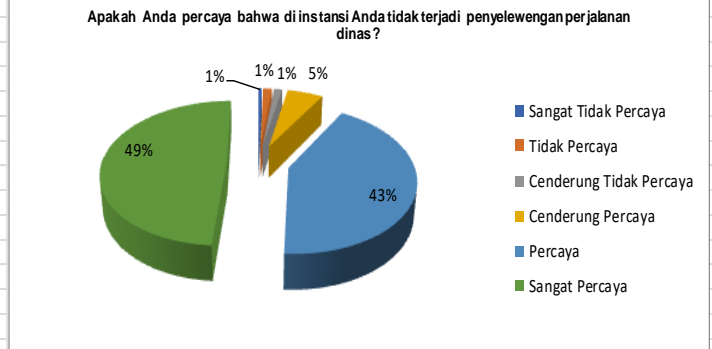
Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar terjadinya penyelewengan anggaran dan/atau proyek fiktif dan/atau penggelembungan anggaran (mark up)?



6	Sepengetahuan Anda, berapa nilai penyelewengan anggaran dan/atau proyek fiktif dan/atau penggelembungan anggaran (mark up) anggaran tersebut tersebut? (jika jawaban lebih dari satu, sebutkan yang terbesar)	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10- 50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
		26	50	45	46	28	142		337



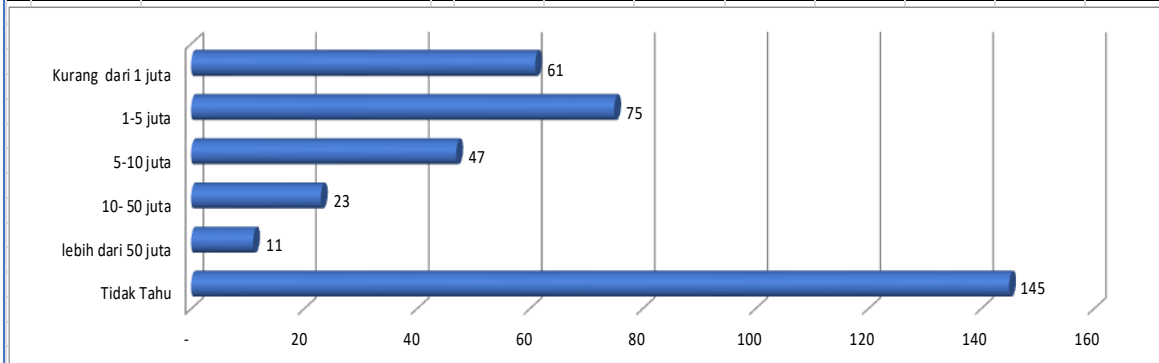
7 Apakah Anda percaya bahwa di instansi Anda tidak terjadi penyelewengan perjalanan dinas? (suku, agama, kekerabatan, ras, almamater dan lainnya)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
	137	381	356	1,560	12,113	13,954		28,501



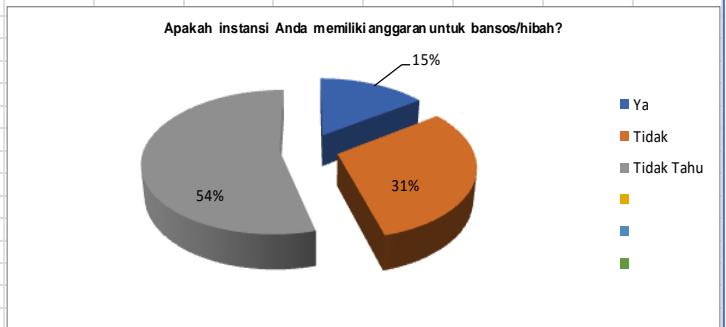
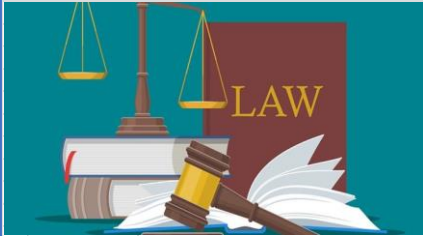
8 Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar penyelewengan perjalanan dinas dilakukan?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
	109	13	23	55	130	28,171		28,501



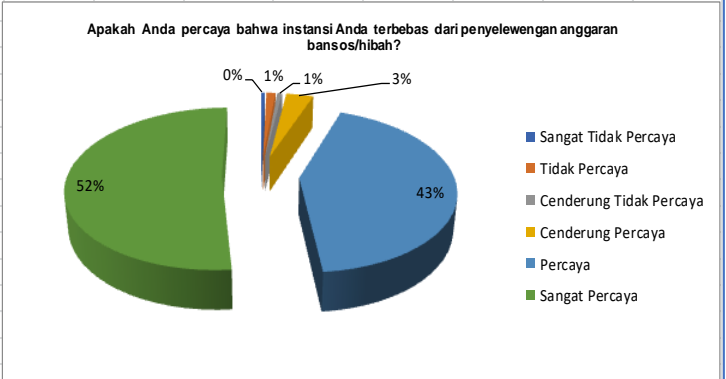
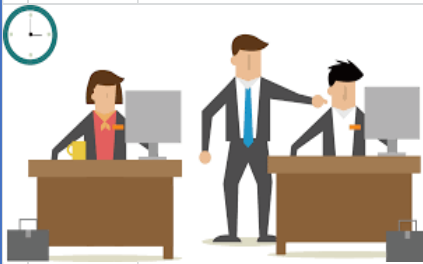
9 Sepengetahuan Anda, berapa nilai penyelewengan perjalanan dinas di instansi Anda? (jika jawaban lebih dari satu, sebutkan yang terbesar;	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10- 50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
	61	75	47	23	11	145		362



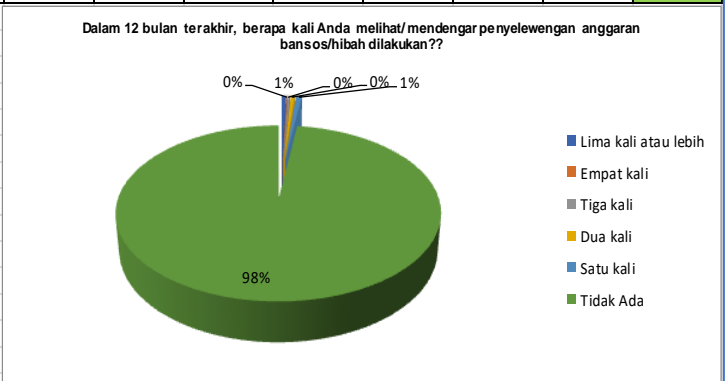
10	Apakah instansi Anda memiliki anggaran untuk bansos/hibah? (jika instansi anda tidak memiliki anggaran bansos/hibah, langsung ke pertanyaan nomor 23)	Ya	Tidak	Tidak Tahu					
		4,313	8,738	15,450					28,501



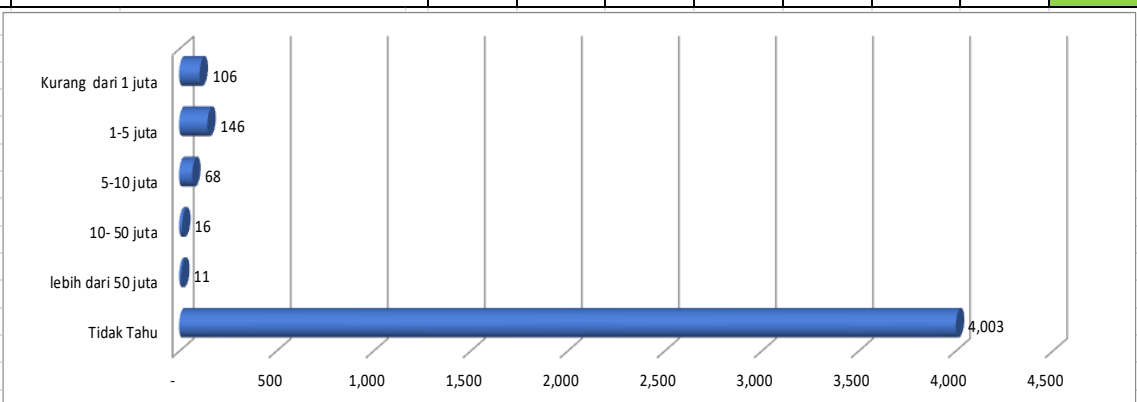
11	Apakah Anda percaya bahwa instansi Anda terbebas dari penyelewengan anggaran bansos/hibah?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		20	48	27	145	1,853	2,220	24,188	4,313



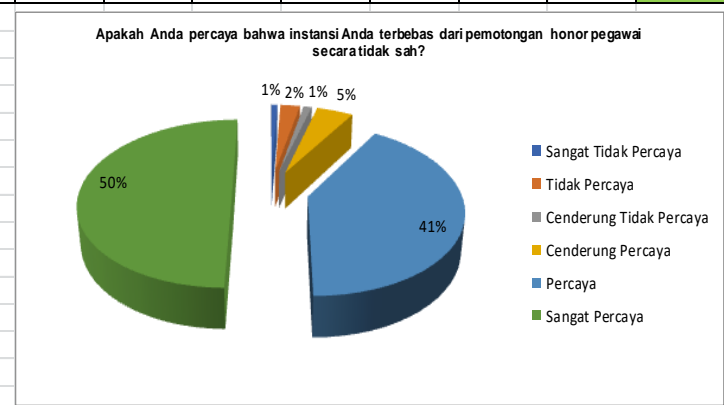
12	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat/mendengar penyelewengan anggaran bansos/hibah dilakukan?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		24	5	10	21	32	4,221	4,313	



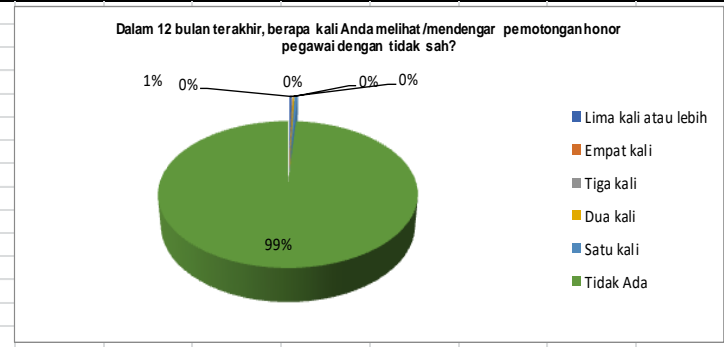
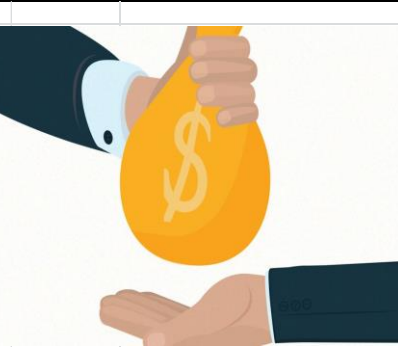
13	Sepengertian Anda, berapa nilai penyelewengan bansos/hibah di instansi Anda? (jika jawaban lebih dari satu, sebutkan yang terbesar)	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10- 50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
		106	146	68	16	11	4,003		4,350



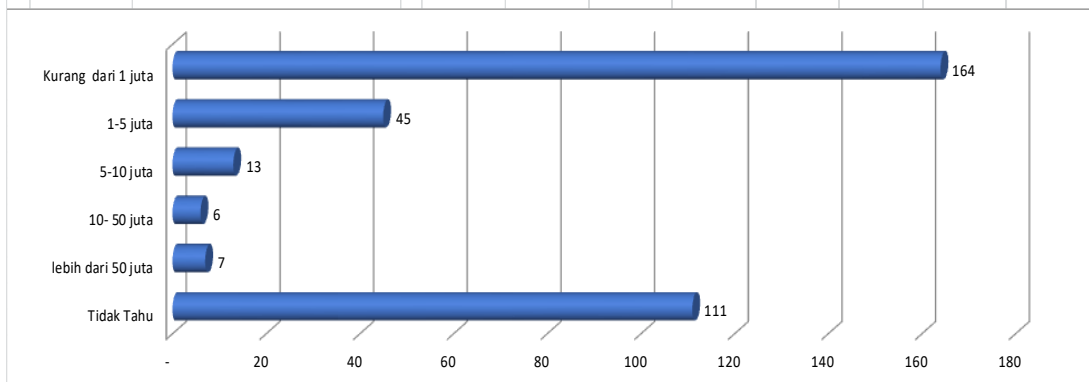
14	Apakah Anda percaya bahwa instansi Anda terbebas dari pemotongan honor pegawai secara tidak sah?	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		212	695	295	1,305	11,775	14,219		28,501



15	Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda melihat /mendengar pemotongan honor pegawai dengan tidak sah?	Lima kali atau lebih	Empat kali	Tiga kali	Dua kali	Satu kali	Tidak Ada		
		99	11	21	48	146	28,176		28,501

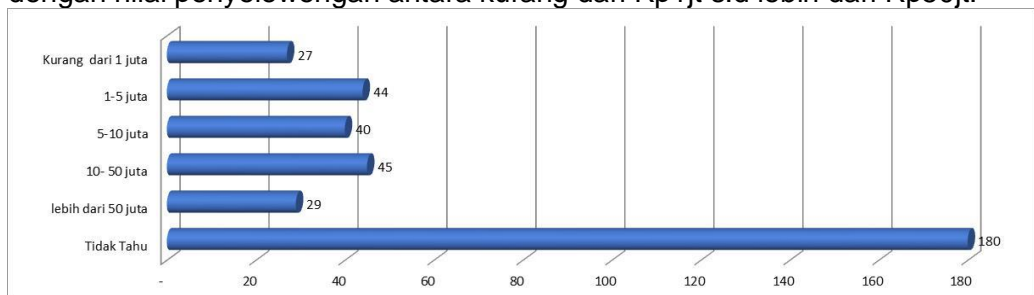


16	Sepengetahuan Anda, berapa nilai pemotongan honor pegawai (individual) dengan tidak sah di instansi Anda? (jika jawaban lebih dari satu, sebutkan yang terbesar)	Kurang dari 1 juta	1-5 juta	5-10 juta	10- 50 juta	lebih dari 50 juta	Tidak Tahu		
		164	45	13	6	7	111		346

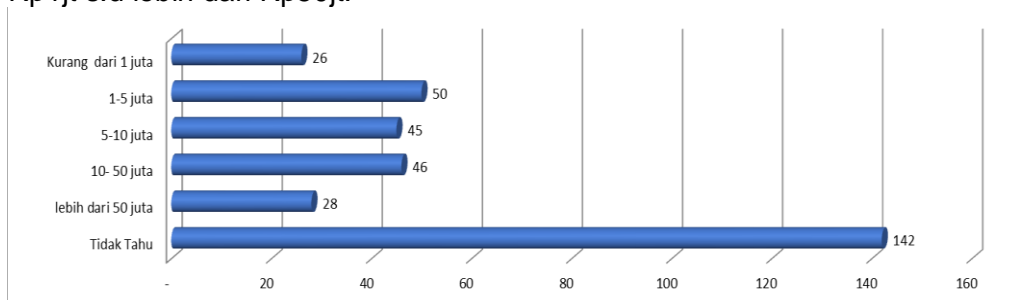


Dari hasil survei diatas bahwa terdapat pegawai sebanyak:

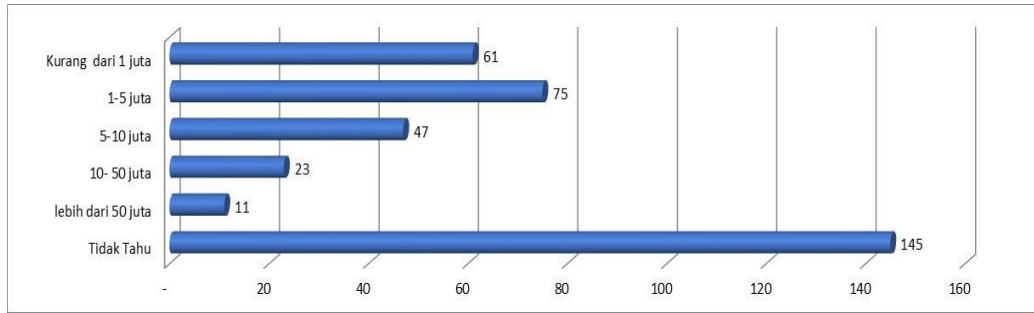
- 1,5% menjawab bahwa pengadaan barang dan jasa di instansi Anda belum terbebas dari penyelewengan
- 84 melihat/ mendengar terjadi penyelewengan pengadaan barang dan jasa, dengan nilai penyelewengan antara kurang dari Rp1jt s.d lebih dari Rp50jt.



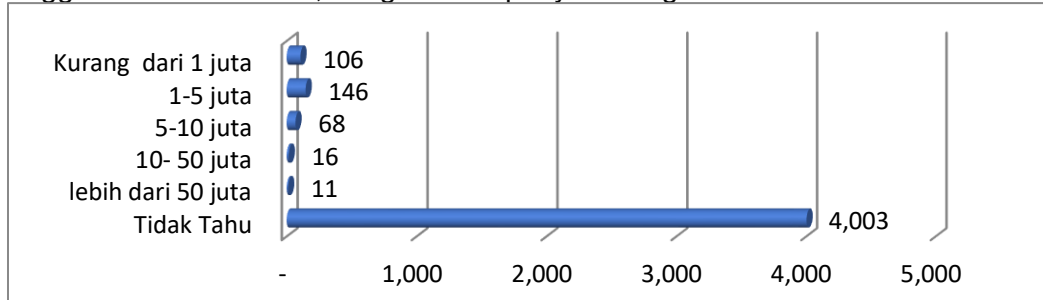
- 2,1% menjawab bahwa di kemenkumham masih terdapat penggelembungan anggaran (mark up) di Kemenkumham, dengan besaran nilai antara kurang dari Rp1jt s.d lebih dari Rp50jt.



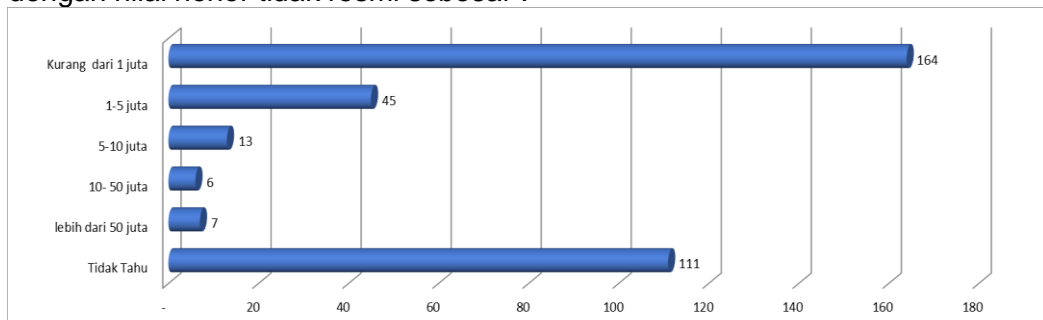
- 1,8% menjawab bahwa di Kemenkumham masih terjadi penyelewengan perjalanan dinas
- tugas/pekerjaan? (suku, agama, kekerabatan, ras, almamater dan lainnya)
- 1,5% menjawab bahwa pengadaan barang dan jasa di Kemenkumham belum terbebas dari penyelewengan.
- 84 orang melihat/ mendengar lebih dari 5 kali terjadi penyelewengan pengadaan barang dan jasa, dengan Nilai penyelewengan barang jasa serta 109 orang mendengar/melihat penyelewengan perjalanan dinas tersebut. Dengan nilai penyelewengan sebagai berikut :



h) 0,2% menjawab bahwa Kemenkumham belum terbebas dari penyelewengan anggaran bansos/hibah, dengan nilai penyelewengan bansos sebesar :



i) 3,2% menjawab bahwa Kemenkumham belum terbebas dari pemotongan honor pegawai secara tidak sah. 99 orang melihat/mendengar lebih dari 5 kali, dengan nilai honor tidak resmi sebesar :



Bahwa secara umum pegawai menilai Kemenkumham adalah:

- organisasi yang memiliki integritas sangat baik dari tahun ke tahun dan percaya bahwa survei PMPI dapat memberi masukan untuk mencegah korupsi pada Kemenkumham.
- area yang memiliki level integritas paling tinggi adalah Budaya Integritas.
- area yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan perlu ditingkatkan adalah Budaya Integritas.
- program yang mampu mencegah/ menghindari kolusi, korupsi, nepotisme, suap dan pungutan liar adalah :
 - Sosialisasi dan pendidikan sejak dini secara berkala tentang integritas, anti korupsi, kode etik
 - Optimalkan pemberian penghargaan dan sanksi
 - Keterbukaan informasi
 - Layanan online
 - Peningkatan kesejahteraan pegawai
 - Optimalkan pengawasan melekat dari Pimpinan dan Instansi terkait

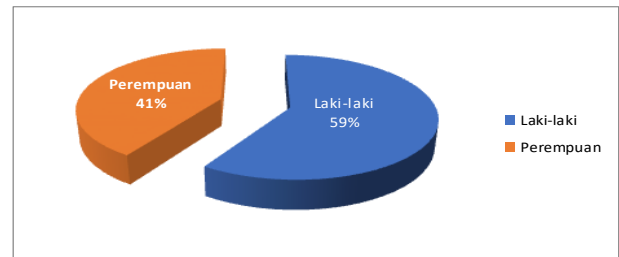
6. Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) EKSTERNAL

Sebaran responden eksternal/pengguna layanan sebanyak 4209 responden, terdiri dari 98 pengguna layanan unit utama dan 4111 pengguna layanan Kantor Wilayah termasuk Unit Pelaksana Teknis. Perbandingan pengguna layanan per jenis kelamin, pekerjaan, kepentingan sebagai berikut :

6.1 Rekapitulasi Pengguna Layanan Per Unit Utama

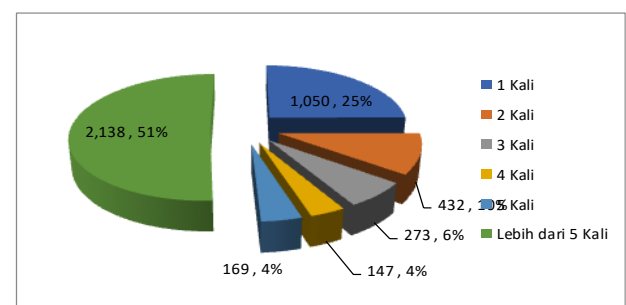
6.1.1 Per Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2,489
2	Perempuan	1,720
Total :		4,209



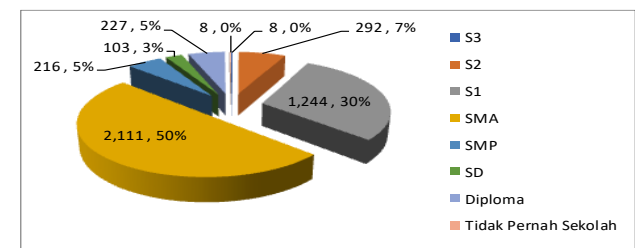
6.1.2 Berdasar Jumlah Kedatangan

No	Berkaitan dengan Instansi	Jumlah
1	1 Kali	1,050
2	2 Kali	432
3	3 Kali	273
4	4 Kali	147
5	5 Kali	169
6	Lebih dari 5 Kali	2,138
Total :		4,209



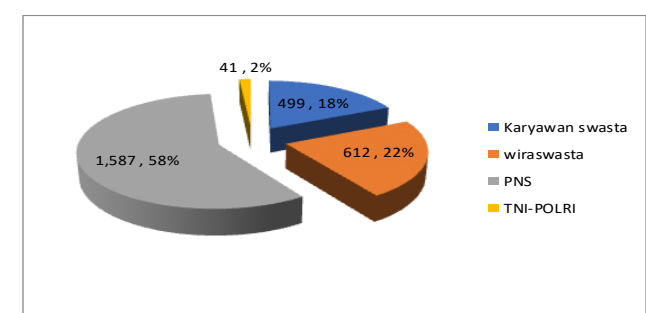
6.1.3 Berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	8
2	S2	292
3	S1	1,244
4	SMA	2,111
5	SMP	216
6	SD	103
7	Diploma	227
8	Tidak Pernah Sekolah	8
Total :		4,209




6.1.4 Berdasar Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan swasta	499
2	wiraswasta	612
3	PNS	1,587
4	TNI-POLRI	41
5	Petani-Nelayan	103
6	Pelajar-Mahasiswa	356
7	Ibu Rumah Tangga	460
8	Profesional (pengacara, ak)	162
9	tidak bekerja	103
10	Lainnya	286
Total :		4,209




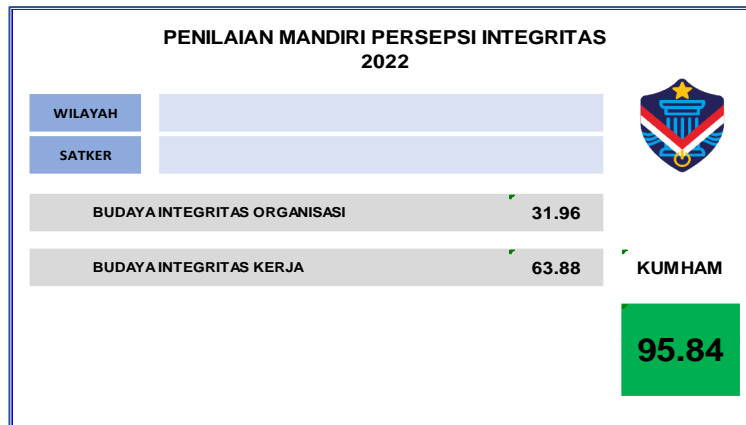
6.1.5 Berdasar Kepentingan

6.2 Rekapitulasi Nilai hasil Survei PMPI Eksternal Unit Utama

REKAPITULASI NILAI SURVEI PERSEPSI SATKER 2022						
UNIT_UTAMA						
						
No	UNIT KERJA / SATKER	TOTAL RESPONDEN	Budaya Integritas Organisasi	Budaya Integritas Kerja	Total Nilai	Nilai Rata-rata
1.	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	16	13.89	15.66	1,504.03	94.00
2.	STAF KHUSUS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3	2.65	2.97	285.83	95.28
3.	STAF AHLI	-	-	-	-	0.00
4.	SEKRETARIAT JENDERAL	18	15.76	16.59	1,630.16	90.56
5.	INSPEKTORAT JENDERAL	18	16.59	17.77	1,735.91	96.44
6.	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDAANGAN	11	9.11	10.69	1,013.55	92.14
7.	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6	3.92	5.66	505.11	84.19
8.	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5	4.25	4.89	466.33	93.27
9.	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	11	9.95	10.86	1,054.03	95.82
10.	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	-	0.00
11.	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	3	2.50	2.92	276.98	92.33
12.	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1	0.90	0.97	94.81	94.81
13.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	1	1.00	1.00	100.00	100.00
14.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	5	3.97	4.86	454.71	90.94
Total Responden		98				93.08

6.2 Rekapitulasi Nilai hasil Survei PMPI Eksternal Seluruh Satuan Kerja

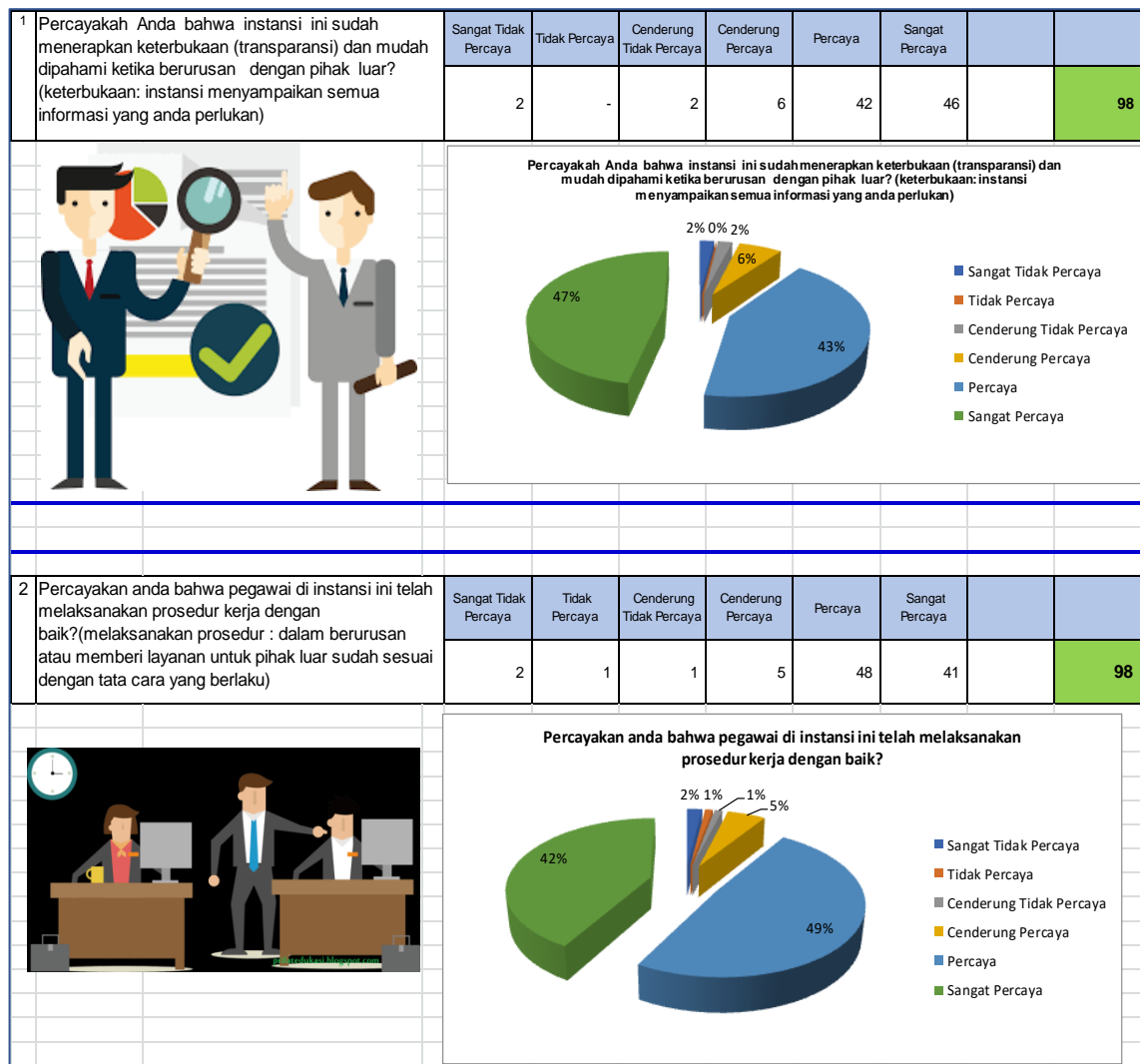
REKAPITULASI NILAI SURVEI PERSEPSI SATKER 2022							
WILAYAH							
							
No	KELOMPOK	UNIT KERJA / SATKER	TOTAL RESPONDEN	Budaya Integritas Organisasi	Budaya Integritas Kerja	Total Nilai	Nilai Rata-rata
1.		UNIT_UTAMA	98	84.49	94.83	9,121.43	93.08
2.		ACEH	16	13.05	15.18	1,443.17	90.20
3.		BALI	114	105.48	112.64	11,013.34	96.61
4.		BANGKA_BELITUNG	185	169.59	181.69	17,745.58	95.92
5.		BANTEN	56	51.99	55.29	5,413.66	96.67
6.		BENGKULU	16	13.19	15.24	1,451.75	90.73
7.		DI_YOGYAKARTA	336	318.21	333.22	32,797.03	97.61
8.		DKI_JAKARTA	198	172.11	192.50	18,536.04	93.62
9.		GORONTALO	19	16.81	18.08	1,763.67	92.82
10.		JAMBI	477	431.60	468.95	45,587.83	95.57
11.		JAWA_BARAT	253	238.44	249.98	24,594.00	97.21
12.		JAWA_TENGAH	284	264.55	280.56	27,495.82	96.82
13.		JAWA_TIMUR	155	143.68	152.51	14,941.79	96.40
14.		KALIMANTAN_BARAT	119	102.71	115.75	11,118.70	93.43
15.		KALIMANTAN_SELATAN	80	70.82	76.54	7,453.48	93.17
16.		KALIMANTAN_TENGAH	88	81.80	86.72	8,499.63	96.59
17.		KALIMANTAN_TIMUR	275	246.56	269.78	26,165.54	95.15
18.		KEPULAUAN_RIAU	338	304.09	332.23	32,237.84	95.38
19.		LAMPUNG	24	23.26	23.86	2,364.78	98.53
20.		MALUKU	17	15.44	16.13	1,588.99	93.47
21.		MALUKU_UTARA	30	27.34	29.58	2,879.30	95.98
22.		NUSA_TENGGARA_BARAT	1	1.00	1.00	100.00	100.00
23.		NUSA_TENGGARA_TIMUR	168	154.20	165.13	16,130.29	96.01
24.		PAPUA	-	-	-	-	0.00
25.		PAPUA_BARAT	3	2.93	3.00	297.69	99.23
26.		RIAU	54	50.28	53.41	5,231.18	96.87
27.		SULAWESI_BARAT	7	6.39	6.92	673.13	96.16
28.		SULAWESI_SELATAN	109	98.35	107.24	10,412.89	95.53
29.		SULAWESI_TENGAH	54	48.41	52.69	5,119.06	94.80
30.		SULAWESI_TENGGARA	29	25.03	28.29	2,715.08	93.62
31.		SULAWESI_UTARA	28	25.87	27.66	2,703.42	96.55
32.		SUMATERA_BARAT	34	32.96	33.80	3,350.84	98.55
33.		SUMATERA_SELATAN	183	160.69	178.53	17,228.55	94.15
34.		SUMATERA_UTARA	358	340.16	354.88	34,972.39	97.69
35.		LAIN-LAIN	3	2.30	2.77	260.62	86.87
Total Responden		4,209					95.84



Nilai/Indeks rata-rata persepsi integritas eksternal sebesar 95,84. Indikator terendah masih sama dengan hasil Tahun 2021 lalu yaitu pada indikator Budaya Integritas Organisasi (31,96). Kantor Wilayah yang tidak ikut partisipasi adalah Kanwil Papua.

6.4 Highlight Hasil PMPI eksternal yang dijawab oleh 10.365 pengguna layanan sebagai berikut:

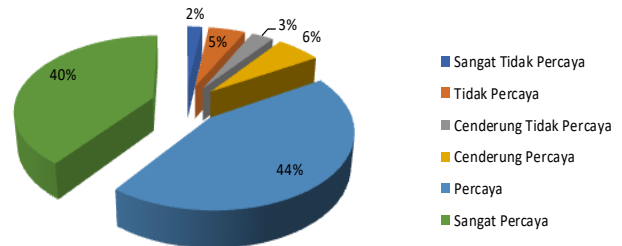
6.4.1 Budaya Integritas Organisasi



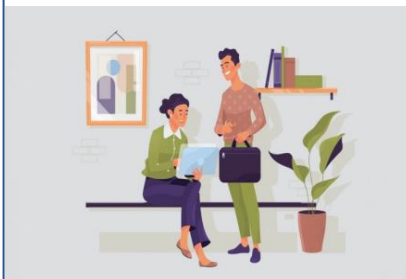
3	Percayakan anda bahwa tidak ada pegawai di instansi ini yang memberikan perlakuan khusus atau prioritas pada orang tertentu? (Perlakuan khusus : jalur cepat, prioritas, memotong antrian dan lainnya. Prioritas: memberikan layanan khusus pada orang/kelompok yang membayar, memiliki hubungan dengan pejabat dan lainnya)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		2	5	3	6	43	39		98



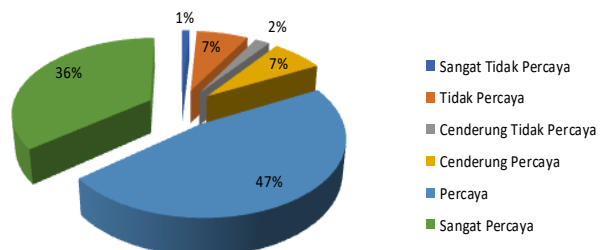
Percayakan anda bahwa tidak ada pegawai di instansi ini yang memberikan perlakuan khusus atau prioritas pada orang tertentu?



4	Percayakan anda bahwa asal usul/ golongan seseorang dapat mempermudah/ mempersulit ketika berurusan dengan instansi ini?(asal usul/golongan : suku, agama, kekerabatan, almamater, dan lainnya)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		1	7	2	7	46	35		98



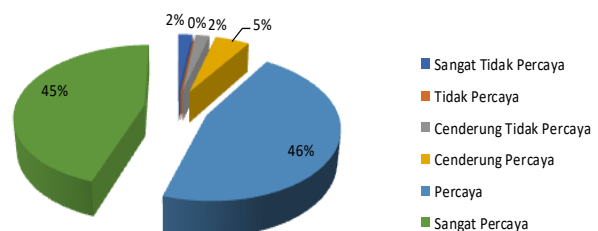
Percayakan anda bahwa asal usul/ golongan seseorang dapat mempermudah/ mempersulit ketika berurusan dengan instansi ini?



5	Percayakan anda bahwa instansi ini sudah melakukan kampanye /himbauan anti korupsi, melalui pemasangan spanduk, banner, stiker, poster dan lainnya, dalam upaya pencegahan korupsi? (kampanye/himbauan nati korupsi : suap, pungli, pemerasan dan lainnya; (upaya pencegahan korupsi berupa pencegahan suap, pungutan liar, pemerasan, korupsi dan lainnya) yang dibuat/dilakukan untuk mengatasi/ menghalangi pegawai melakukan korupsi)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya		
		2	-	2	5	45	44		98



Percayakan anda bahwa instansi ini sudah melakukan kampanye/himbauan anti korupsi, melalui pemasangan spanduk, banner, stiker, poster dan lainnya, dalam upaya pencegahan korupsi?

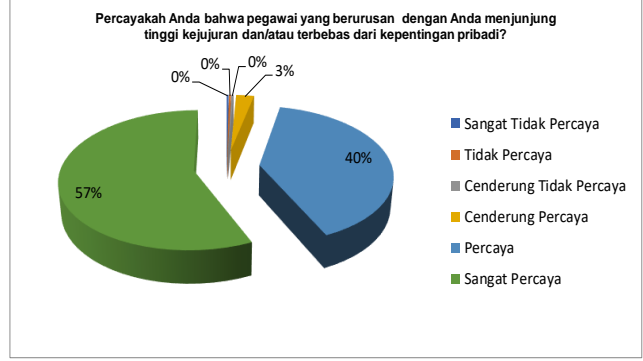


Dari tabel tersebut bahwa walaupun Kemenkumham sudah melakukan kampanye /himbauan anti korupsi, melalui pemasangan spanduk, banner, stiker, poster dan lainnya, dalam upaya pencegahan korupsi, namun terdapat pengguna layanan sebanyak :

- a. 1% menjawab bahwa Kemenkumham belum optimal menerapkan keterbukaan (transparansi) dan mudah dipahami ketika berurusan dengan pihak luar, meliputi keterbukaan: instansi menyampaikan semua informasi yang anda perlukan.
- b. 0,4% menjawab bahwa pegawai Kemenkumham belum melaksanakan prosedur kerja dengan baik meliputi melaksanakan prosedur dalam berurusan atau memberi layanan untuk pihak luar sudah sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- c. 2,2% menjawab masih terdapat pegawai Kemenkumham yang memberikan perlakuan khusus atau prioritas pada orang tertentu seperti perlakuan khusus: jalur cepat, prioritas, memotong antrian dan lainnya. Prioritas: memberikan layanan khusus pada orang/kelompok yang membayar, memiliki hubungan dengan pejabat dan lainnya.
- d. 2,1% menjawab bahwa asal usul/ golongan seseorang dapat mempermudah/ mempersulit ketika berurusan dengan Kemenkumham missal asal usul/golongan: suku, agama, kekerabatan, almamater, dan lainnya.
- e. 0,5% menjawab bahwa Kemenkumham belum melakukan kampanye /himbauan anti korupsi, melalui pemasangan spanduk, banner, stiker, poster dan lainnya, dalam upaya pencegahan korupsi, mellalui (kampanye/imbauan nati korupsi: suap, pungli, pemerasan dan lainnya; (upaya pencegahan korupsi berupa pencegahan suap, pungutan liar, pemerasan, korupsi dan lainnya) yang dibuat/dilakukan untuk mengatasi/ menghalangi pegawai melakukan korupsi.
- f. 4,3% menjawab bahwa bila pegawai Kemenkumham melakukan korupsi tidak akan diproses secara hukum dan diberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya.
- g. 0,8% menjawab bahwa Kemenkumham belum memiliki tata cara menerima laporan masyarakat terkait korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya. (tata cara pelaporan korupsi/ gratifikasi/ pungli dan lainnya serta tersedia nomor, saluran atau orang yang bisa dihubungi).
- h. 1% menjawab bahwa Kemenkumham kurang memberikan perlindungan untuk masyarakat yang melaporkan korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya berupa memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan pelapor.
- i. 1% menjawab bahwa laporan masyarakat tentang korupsi di Kemenkumham kurang segera ditindaklanjuti meliputi melakukan penyelidikan kejadian, memproses pelaku, pemberian sanksi kepada pegawainya.

6.4.2 Budaya Integritas Kerja

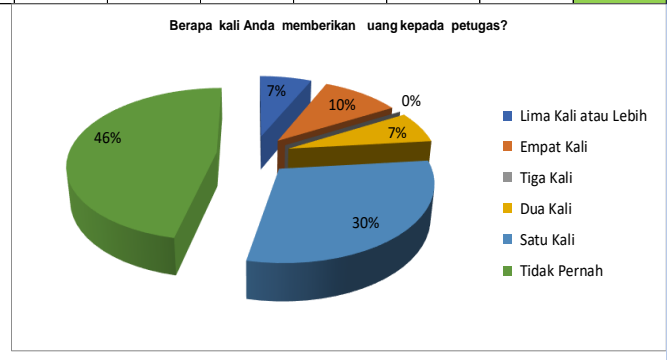
1 Percayakah Anda bahwa pegawai yang berurusan dengan Anda menjunjung tinggi kejujuran dan/atau terbebas dari kepentingan pribadi? (Kejujuran memberikan keterangan/informasi yang benar; Kepentingan pribadi : kepentingan diluar kedinasan/tugas).	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya	Jumlah Responden
	11	11	13	107	1.679	2.388	4.209



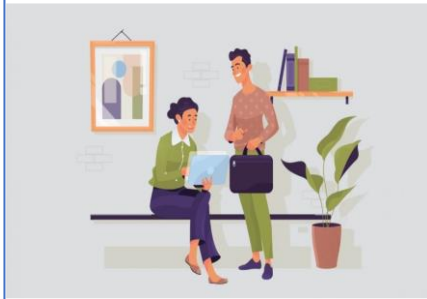
2 Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda pernah diminta uang? (administrasi, transportasi, rokok, kopi dan lainnya) saat berurusan dengan pegawai di instansi ini?	YA	TIDAK					Jumlah Responden
	30	4.179					4.209



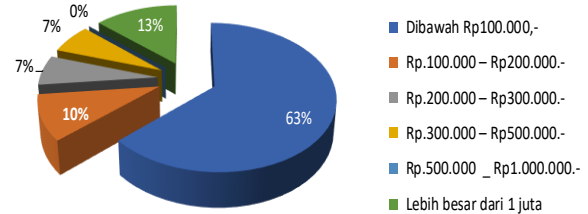
3 Berapa kali Anda memberikan uang kepada petugas? (abaikan jika jawaban No.2 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.6)	Lima Kali atau Lebih	Empat Kali	Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali	Tidak Pernah	Jumlah Responden
	2	3	-	2	9	14	30



4 Berapa nilai uang yang Anda berikan kepada petugas?(abaikan jika jawaban No.2 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.6)	Dibawah Rp100.000,-	Rp.100.000 – Rp200.000,-	Rp.200.000 – Rp300.000,-	Rp.300.000 – Rp500.000,-	Rp.500.000 – Rp1.000.000,-	Lebih besar dari 1 juta	Jumlah Responden
	19	3	2	2	-	4	30



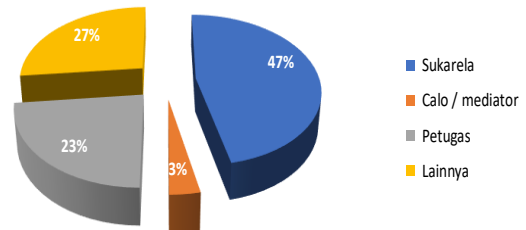
Berapa nilai uang yang Anda berikan kepada petugas?



5 Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut? (abaikan jika jawaban No.2 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.6)	Sukarela	Calo / mediator	Petugas	Lainnya		Jumlah Responden
	14	1	7	8		30



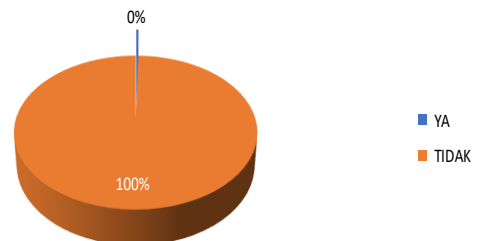
Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut?



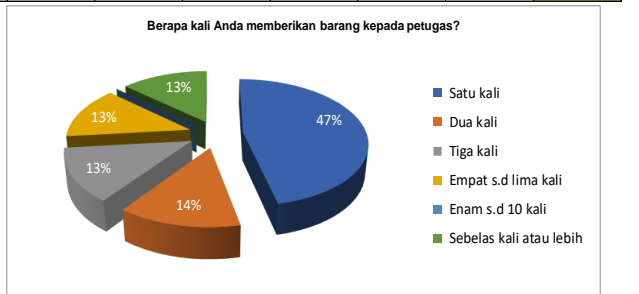
6 Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda pernah diminta barang/fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai di instansi ini?	YA	TIDAK				Jumlah Responden
	15	4.194				4.209



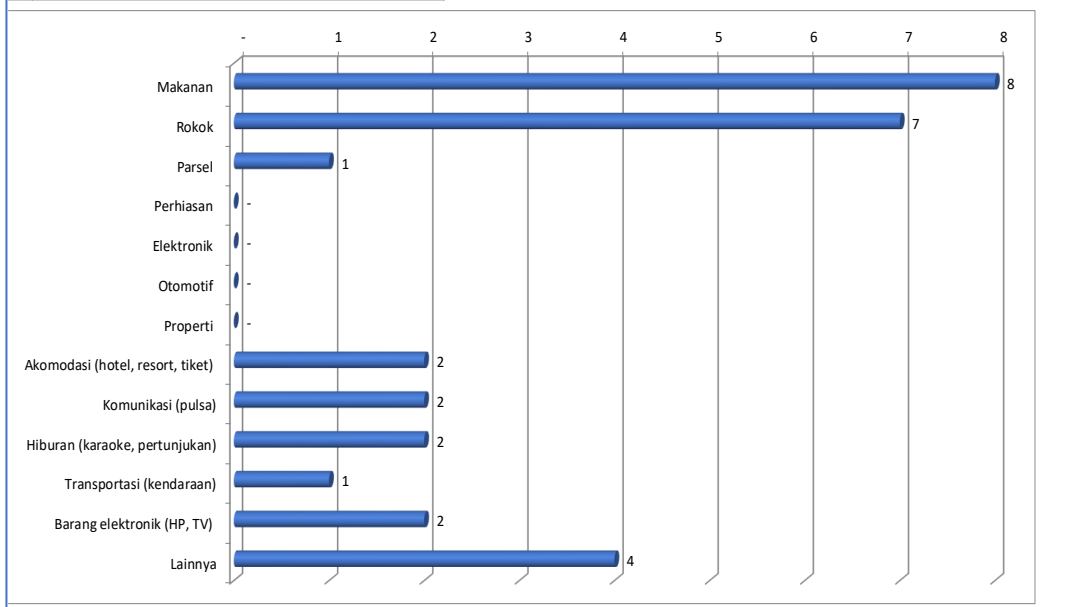
Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda pernah diminta barang/fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai di instansi ini?



7 Berapa kali Anda memberikan barang kepada petugas? (abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)	Satu kali	Dua kali	Tiga kali	Empat s.d lima kali	Enam s.d 10 kali	Sebelas kali atau lebih	Jumlah Responden
	7	2	2	2	-	2	15

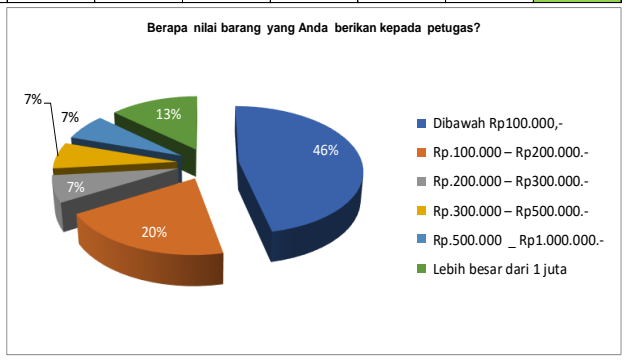


8 Apa bentuk barang yang Anda berikan?
(Jawaban bisa lebih dari satu);
(abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)

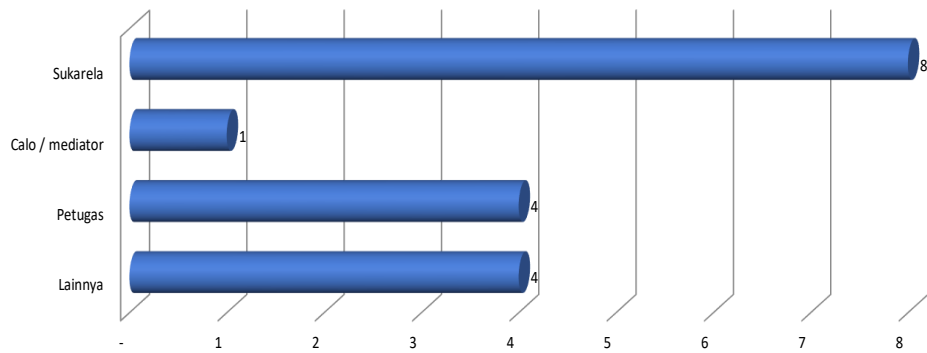


9 Berapa nilai barang yang Anda berikan kepada petugas?
(Jika Jawaban bisa lebih dari satu kali maka pilih yang terbesar;
(abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)

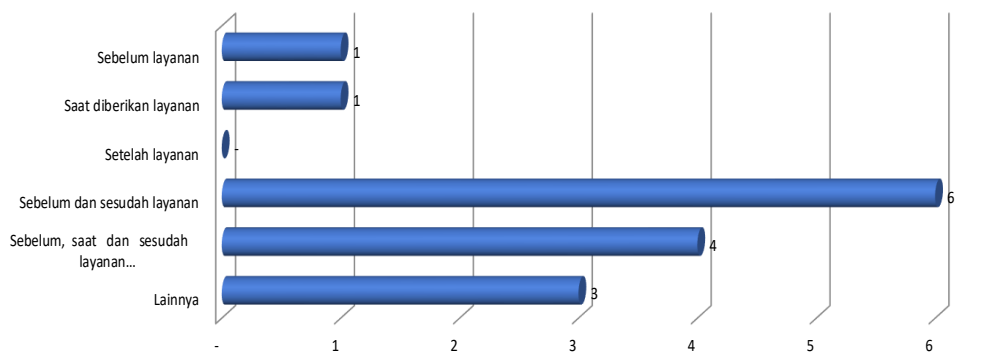
Dibawah Rp100.000,-	Rp.100.000 – Rp200.000,-	Rp.200.000 – Rp300.000,-	Rp.300.000 – Rp500.000,-	Rp.500.000 – Rp1.000.000,-	Lebih besar dari 1 juta	Jumlah Responden
7	3	1	1	1	2	15



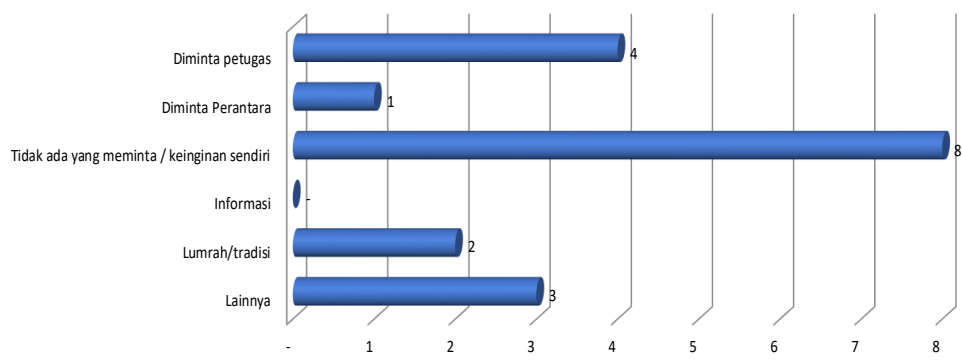
10	Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut? (Jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)	Sukarela	Calo / mediator	Petugas	Lainnya			Jumlah Responden
		8	1	4	4			17



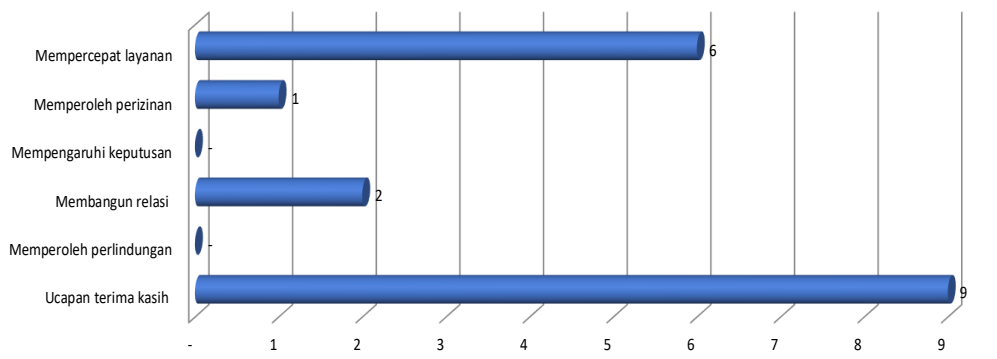
11	Pada saat yang mana anda melakukan pemberian (uang, barang, fasilitas) tersebut? (Jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)	Sebelum layanan	Saat diberikan layanan	Setelah layanan	Sebelum dan sesudah layanan	Sebelum, saat dan sesudah	Lainnya	Jumlah Responden
		1	1	-	6	4	3	15



12	Dari mana Anda mendapatkan informasi harus memberikan sesuatu (uang, barang, fasilitas) kepada petugas? (Jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)	Diminta petugas	Diminta Perantara	Tidak ada yang meminta / keinginan	Informasi	Lumrah/tradisi	Lainnya	Jumlah Responden
		4	1	8	-	2	3	13



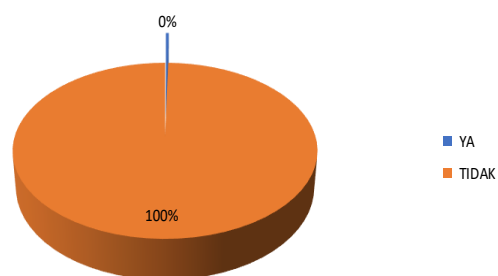
13 Apa alasan Anda melakukan pemberian (uang, barang, fasilitas) tersebut ? (Jawaban bisa lebih dari satu; abaikan jika jawaban No.6 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.14)	Mempercepat layanan	Memperoleh perizinan	Mempengaruhi keputusan	Membangun relasi	Memperoleh perlindungan	Ucapan terima kasih	Jumlah Responden
	6	1	-	2	-	9	9



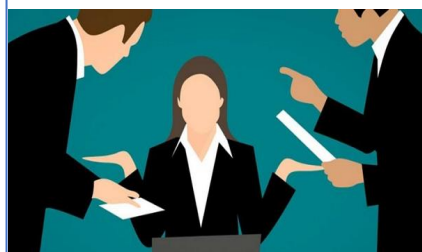
14 Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda memberikan hadiah/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) pada pegawai di instansi tersebut walaupun tidak sedang mengurus layanan tertentu?	YA	TIDAK					Jumlah Responden
	16	4.193					4.209



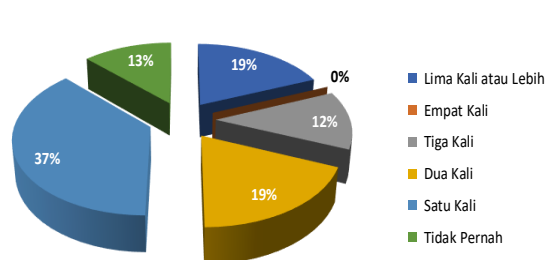
Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda pernah diminta barang/fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai di instansi ini?



15 Berapa kali Anda memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) kepada pegawai instansi? (abaikan jika jawaban No.14 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.21)	Lima Kali atau Lebih	Empat Kali	Tiga Kali	Dua Kali	Satu Kali	Tidak Pernah	Jumlah Responden
	3	-	2	3	6	2	16



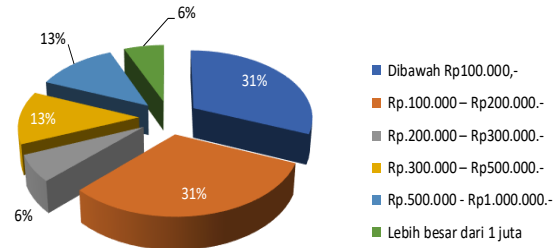
Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda pernah diminta barang/fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai di instansi ini?



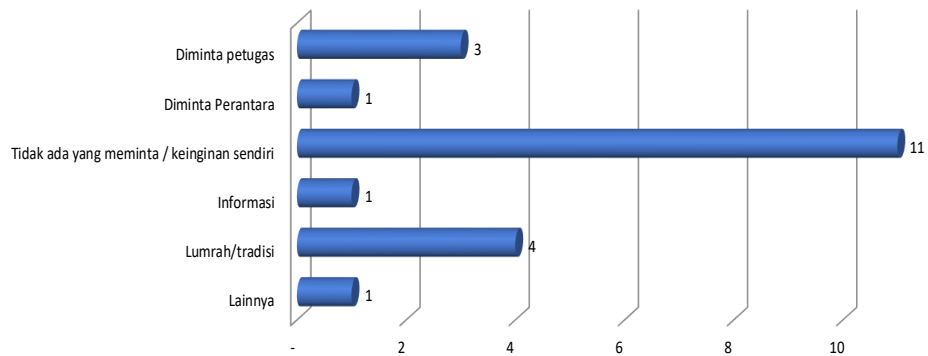
16 Berapa nilai hadiah (uang, barang, fasilitas) yang Anda berikan kepada pegawai instansi? (Jika jawaban lebih dari satu kali sebutkan yang terbesar; (abaikan jika jawaban No.14 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.21)	Dibawah Rp100.000,-	Rp.100.000 - Rp200.000,-	Rp.200.000 - Rp300.000,-	Rp.300.000 - Rp500.000,-	Rp.500.000 - Rp1.000.000,-	Lebih besar dari 1 juta	Jumlah Responden
	5	5	1	2	2	1	16



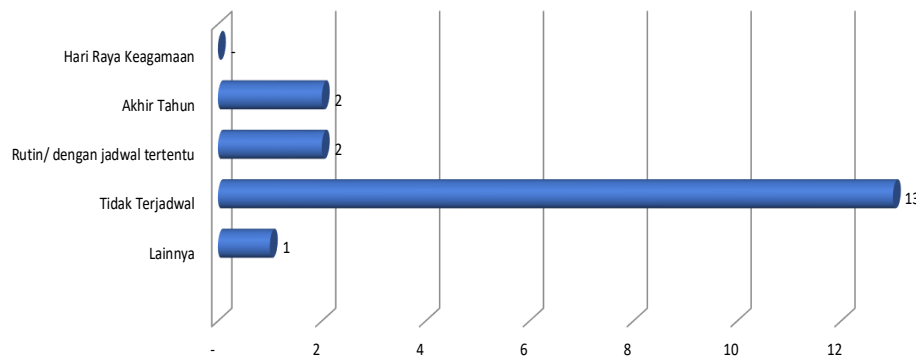
Berapa nilai hadiah (uang, barang, fasilitas) yang Anda berikan kepada pegawai instansi?



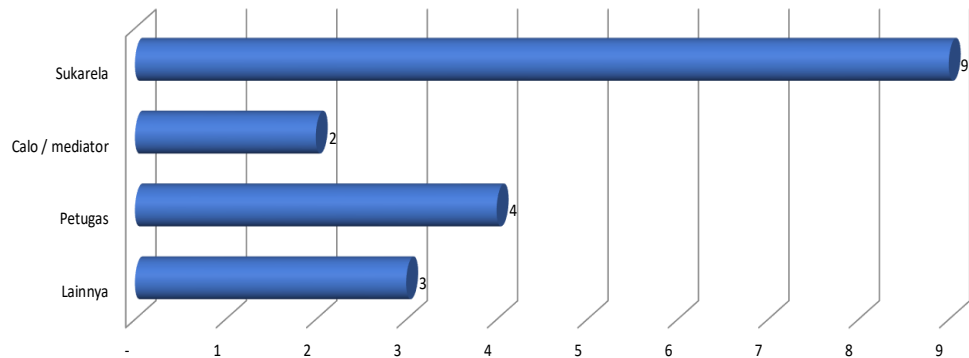
17 Dari mana Anda mendapat informasi harus memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) kepada pegawai instansi tersebut?(jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.14 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.21)	Diminta petugas	Diminta Perantara	Tidak ada yang meminta /	Informasi	Lumrah/tradisi	Lainnya	Jumlah Responden
	3	1	11	1	4	1	16



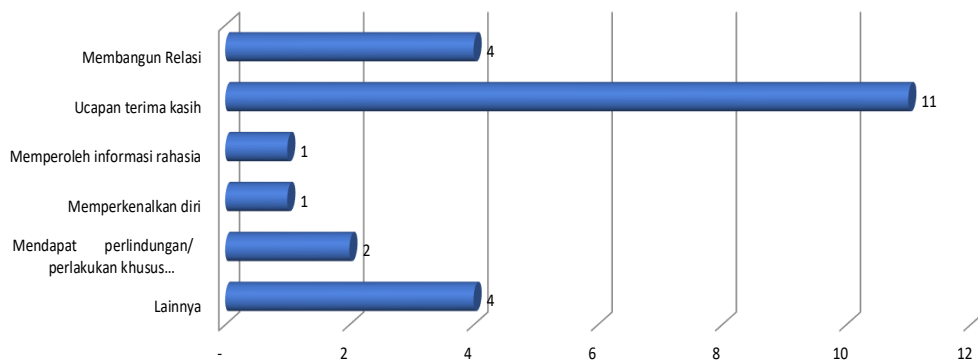
18 Kapan Anda harus memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) kepada pegawai instansi?(jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.14 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.21)	Hari Raya Keagamaan	Akhir Tahun	Rutin/ dengan jadwal	Tidak Terjadwal	Lainnya	Jumlah Responden
	-	2	2	13	1	17



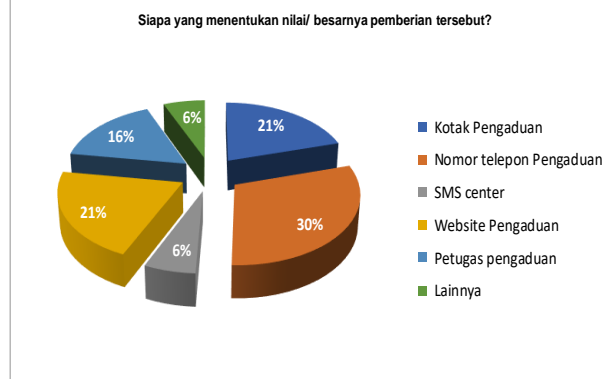
19 Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.14 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.21)	Sukarela	Calo / mediator	Petugas	Lainnya			Jumlah Responden
	9	2	4	3			18



20 Apa alasan Anda melakukan pemberian (uang, barang, fasilitas) tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu; (abaikan jika jawaban No.14 adalah TIDAK, dan lanjut ke No.21)	Membangun Relasi	Ucapan terima kasih	Memperoleh informasi	Memperkenalkan diri	Mendapat perlindungan / perlakuan khusus...	Lainnya	Jumlah Responden
	4	11	1	1	2	4	19



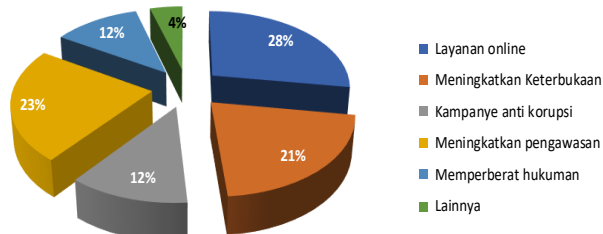
21 Untuk terlibat dalam pencegahan korupsi di instansi ini, saluran apa yang paling mudah bagi Anda?	Kotak Pengaduan	Nomor telepon Pengaduan	SMS center	Website Pengaduan	Petugas pengaduan	Lainnya	Jumlah Responden
	863	1.271	249	877	685	264	4.209



22	Program apa yang menurut Anda paling mampu mencegah/menghindari korupsi di instansi ini?	Layanan online	Meningkatkan Keterbukaan	Kampanye anti korupsi	Meningkatkan pengawasan	Memperberat hukuman	Lainnya	Jumlah Responden
		1.156	896	496	981	494	186	4.209



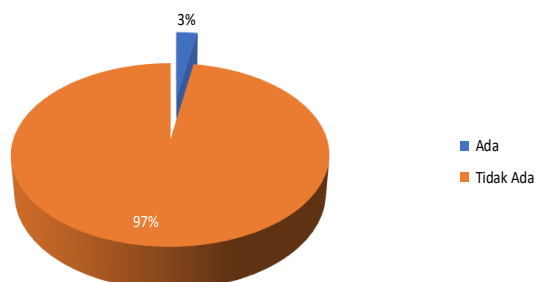
Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut?



23	Sebelum menjawab survei ini, apakah dan pegawai/ pejabat yang mengarahkan Anda untuk memberikan jawaban yang bagus/baik-baik saja?	Ada	Tidak Ada					Jumlah Responden
		114	4.095					4.209



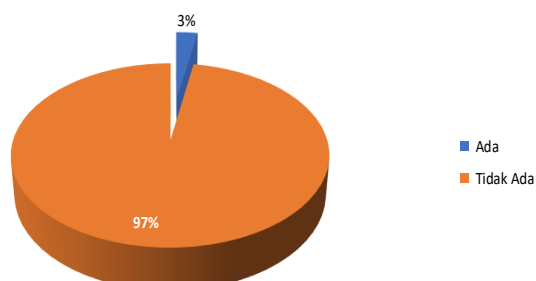
Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut?



24	Apakah Anda percaya jika survei semacam ini mampu membantu pencegahan korupsi pada sektor publik (Birokrasi/penyelenggara Negara)	Sangat Tidak Percaya	Tidak Percaya	Cenderung Tidak Percaya	Cenderung Percaya	Percaya	Sangat Percaya	Jumlah Responden
		24	40	59	316	1.739	2.031	4.209



Siapa yang menentukan nilai/ besarnya pemberian tersebut?



Dari tabel tersebut, atas indikator Budaya Interitas Kerja masih terdapat pengguna layanan sebanyak :

- a. 0,5% menjawab asih bahwa bila berurusan dengan Kemenkumham masih terdapat pegawai yang kurang menjunjung tinggi kejujuran dan/atau terbebas dari kepentingan pribadi, seperti Kejujuran memberikan keterangan/informasi yang benar.
- b. 0,7% menjawab dalam satu tahun terakhir pernah diminta uang dan/atau secara sukarela untuk administrasi, transportasi, rokok, kopi dan lainnya saat berurusan dengan Kemenkumham. Dengan nilai paling banyak menjawab dibawah Rp.100.000,- dan ada yang menjawab lebih dari Rp1.000.000,-.
- c. 0,4% menjawab pernah diminta dan /atau memberi barang/fasilitas di luar ketentuan saat berurusan dengan petugas Kemenkumham. Paling banyak menjawab dalam bentuk makanan dan rokok dan diberikan Ketika Ssebelum dan sesudah selesai menerima layanan atas keinginan sendiri sebagai ucapan terima kasih.
- d. 0,4% menjawab bahwa pengguna layanan pernah memberikan hadiah/gratifikasi (uang, barang, fasilitas) pada pegawai Kemenkumham tersebut walaupun tidak sedang mengurus layanan tertentu lebih dari 5 kali antara Rp.100.000,- s.d Rp.200.000,- atas keinginan sendiri sebagai ucapan terima kasih dan tidak ada jawal pasti saat memberikan ke pegawai Kemenkumham.
- e. 3,1% menjawab untuk terlibat dalam pencegahan korupsi paling mudah melalui nomor telepon pengaduan serta layanan online adalah sarana paling mampu dalam pencegahan korupsi.
- f. 2,7% menjawab saat mengisi survei ini diarahkan oleh pegawai/ pejabat jawaban yang bagus/baik-baik saja.
- g. 1,5% menjawab bahwa survei semacam ini belum mampu membantu pencegahan korupsi.

7. Hasil Penialian Mandiri Persepsi Integritas Secara Keseluruhan

Bahwa telah diuraikan diatas hasil penilaian PMPI Internal memperoleh nilai sebesar 94,68 dan PMPI eksternal memperoleh nilai sebesar 95,84. Dan Penialian Mandiri Persepsi Integritas secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 95,26 (sangat baik) dengan skala sebagai berikut:

Indikator PMPI Internal		Indikator PMPI Eksternal	
Budaya Organisasi	22,56	Budaya Integritas Organisasi	31,96
Sistem Anti Korupsi	15,16		
Pengelolaan SDM	16,40	Budaya Integritas Kerja	63,88
Pengelolaan Anggaran	40,56		
Indeks Rata2 PMPI Internal	94,68	Indeks Rata2PMPI Eksternal	95,84
Indeks Rata2 PMPI Tahun 2021 = 95,26 (sangat baik)			

Skala Penilaian :
 0-20 = Sangat Buruk
 21-40 = Buruk
 41-60 = Cukup
 61-80 = Baik
 81-100 = Sangat Baik

8. Penilaian/Survei Lapangan PMPI

PMPI Tahun 2022 dilaksanakan survei/penilaian lapangan ke 4 (empat) satuan kerja sampling yaitu Kantor Wilayah DI.Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan Pergerakan kegiatan Masyarakat (PPKM) dan anggaran perjalanan dinas survei lapangan PMPI dilakukan refocusing melalui penghematan belanja negara untuk pencegahan dan penanganan pandemic COVID19 Nasional. Hasil dari survei lapangan bahwa rata-rata responden/pengguna layanan Kemenkumham menyatakan layanan Kemenkumham sangat baik, sarana layanan baik dan petugas layanan ramah. Saran dari pengguna layanan agar waktu kunjungannya bagi keluarga warga binaan ditambah, terus tingkatkan layanan online dan membuat inovasi baru untuk mempermudah layanan, masyarakat akan ikut berpartisipasi pencegahan korupsi dengan melaporkan bila melihat dan/atau mendengar adanya praktek pungli/korupsi di satuan kerja Kemenkumham.

9. Pengolahan Analisis Data Kalibrasi

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan hasil dari penilaian PMPI *online* dengan capaian kinerja Kemenkumham sebagai berikut:

9.1. Opini atas Laporan Keuangan Kemenkumham

Tahun 2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tentang Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dan telah berturut-turut 13 s.d 2021 memperoleh opini WTP.

9.2 Kepatuhan Pelaporan LHKASN (lhkasn.kemenkumham.go.id) pelaporan LHKASN per tanggal 22 November 2022 telah 100%, sebagai berikut :

No	Wilayah / Unit Kerja	Wajib Laport	Total Kirim	Persentasi(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3*100)
1	SEKRETARIAT JENDERAL	621	621	100.00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	94	121	100.00
3	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	142	142	100.00
4	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	267	317	100.00
5	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	401	578	100.00
6	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	354	391	100.00
7	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	254	254	100.00
8	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	165	166	100.00
9	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	67	110	100.00
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	94	94	100.00
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	233	233	100.00
12	ACEH	1430	1502	100.00
13	SUMATERA UTARA	3249	3303	100.00
14	RIAU	1512	1512	100.00
15	KEPULAUAN RIAU	1024	1097	100.00
16	SUMATERA BARAT	1208	1253	100.00
17	JAMBI	1012	1046	100.00
18	BENGGULU	576	655	100.00
19	SUMATERA SELATAN	1631	1668	100.00
20	BANGKA BELITUNG	581	581	100.00
21	LAMPUNG	1525	1604	100.00
22	DKI JAKARTA	2848	2857	100.00
23	BANTEN	1414	1468	100.00
24	JAWA BARAT	3787	3874	100.00
25	JAWA TENGAH	3788	4098	100.00
26	JAWA TIMUR	3947	4126	100.00
27	YOGYAKARTA	1101	1107	100.00
28	BALI	1167	1195	100.00
29	NUSA TENGGARA BARAT	866	887	100.00
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1327	1359	100.00
31	KALIMANTAN BARAT	1325	1325	100.00
32	KALIMANTAN TENGAH	872	901	100.00
33	KALIMANTAN TIMUR	1343	1412	100.00
34	KALIMANTAN SELATAN	1241	1318	100.00
35	SULAWESI TENGAH	772	772	100.00
36	SULAWESI UTARA	962	979	100.00
37	GORONTALO	358	358	100.00
38	SULAWESI BARAT	446	446	100.00
39	SULAWESI TENGGARA	711	720	100.00
40	SULAWESI SELATAN	1947	1989	100.00
41	MALUKU UTARA	523	558	100.00
42	MALUKU	725	794	100.00
43	PAPUA BARAT	518	520	100.00
44	PAPUA	950	950	100.00
	TOTAL	49378	51261	100.00

Sumber data : Kelompok Substansi Kepegawaian ITJEN, per 22 Nov 2022

Pelaporan LHKPN PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

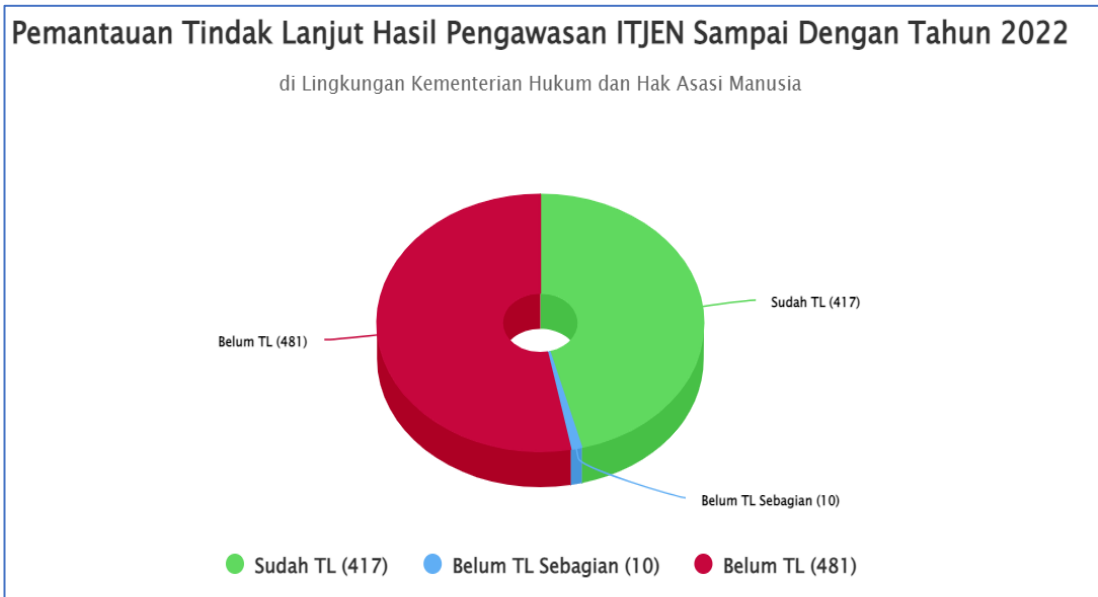
No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Belum Lengkap	Antrian	Lengkap
-	JUMLAH	5259	5226	33	406	0	4820

Dengan rincian data per 22 November 2022 sebagai berikut :

1	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	30	30	0	0	0	30	100.00%	100.00%
2	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	122	122	0	0	0	122	100.00%	100.00%
3	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG	74	74	0	0	0	74	100.00%	100.00%
4	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	310	310	0	0	0	310	100.00%	100.00%
5	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	160	160	0	0	0	160	100.00%	100.00%
6	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	162	162	0	0	0	162	100.00%	100.00%
7	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%
8	STAF AHLI	5	5	0	0	0	5	100.00%	100.00%
9	WAKIL PIMPINAN	1	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%
10	INSPEKTORAT JENDERAL	144	144	0	0	0	144	100.00%	100.00%
11	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	420	420	0	8	0	412	100.00%	98.10%
12	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	50	50	0	1	0	49	100.00%	98.00%
13	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	162	162	0	4	0	158	100.00%	97.53%
14	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	39	39	0	1	0	38	100.00%	97.44%
15	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	114	114	0	3	0	111	100.00%	97.37%
16	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	186	186	0	5	0	181	100.00%	97.31%
17	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	61	61	0	2	0	59	100.00%	96.72%
18	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	91	91	0	3	0	88	100.00%	96.70%
19	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	354	354	0	15	0	339	100.00%	95.76%
20	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	94	94	0	4	0	90	100.00%	95.74%
21	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA	94	94	0	5	0	89	100.00%	94.68%
22	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	164	164	0	10	0	154	100.00%	93.90%
23	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	97	97	0	6	0	91	100.00%	93.81%
24	SEKRETARIAT JENDERAL	60	59	1	3	0	56	98.33%	93.33%
25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	171	171	0	12	0	159	100.00%	92.98%
26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	26	26	0	2	0	24	100.00%	92.31%
27	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	62	62	0	5	0	57	100.00%	91.94%
28	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	37	37	0	3	0	34	100.00%	91.89%
29	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	96	96	0	8	0	88	100.00%	91.67%
30	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	126	126	0	11	0	115	100.00%	91.27%
31	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	142	142	0	15	0	127	100.00%	89.44%
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	91	91	0	10	0	81	100.00%	89.01%
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	92	92	0	11	0	81	100.00%	88.04%
34	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	29	28	1	3	0	25	96.55%	86.21%
35	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	53	53	0	8	0	45	100.00%	84.91%
36	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	72	72	0	11	0	61	100.00%	84.72%
37	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	103	103	0	16	0	87	100.00%	84.47%
38	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	87	87	0	14	0	73	100.00%	83.91%
39	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	179	165	14	15	0	150	92.18%	83.80%
40	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	66	66	0	11	0	55	100.00%	83.33%
41	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	139	139	0	26	0	113	100.00%	81.29%
42	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	63	57	6	7	0	50	90.48%	79.37%
43	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	262	262	0	57	0	205	100.00%	78.24%
44	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	132	132	0	31	0	101	100.00%	76.52%
45	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	93	93	0	22	0	71	100.00%	76.34%
46	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	65	65	0	21	0	44	100.00%	67.69%
47	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	78	67	11	17	0	50	85.90%	64.10%
	JUMLAH	5259	5226	33	406	0	4820		

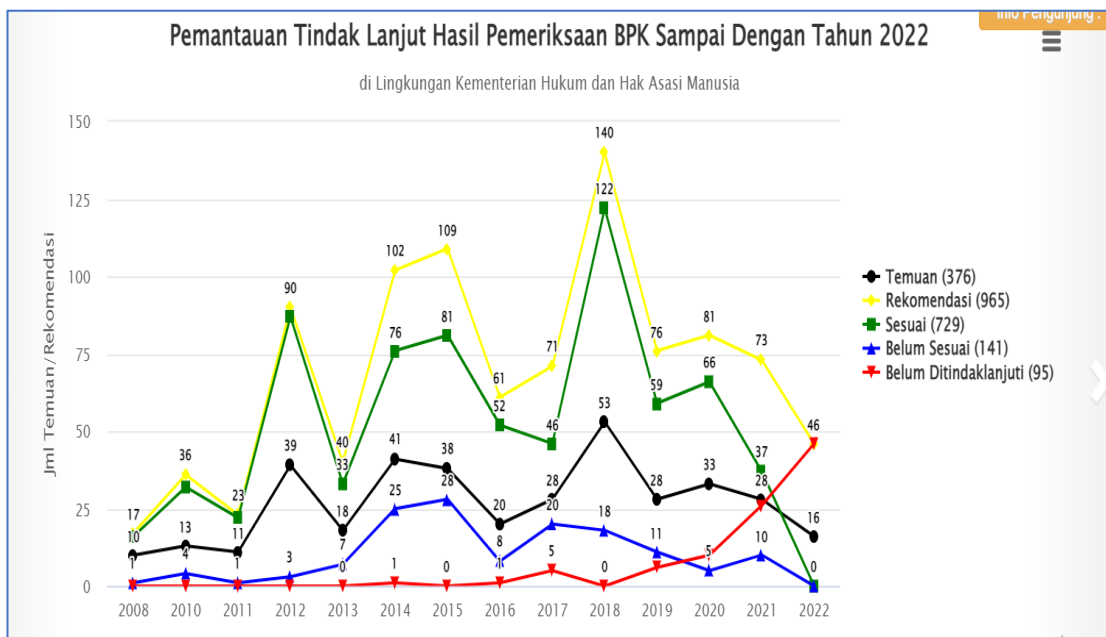
Sumber data : Kelompok Substansi Kepegawaian ITJEN, per 22 Nov 2022

9.3 Tindaklanjuti Rekomendasi Temuan Internal dan Eksternal sebagai berikut :
 Bahwa sd Tahun 2022 total rekomendasi hasil Pengawasan APIP sebanyak 417 sudah ditindaklanjuti, 10 belum tindaklanjuti Sebagian dan 481 belum ditindaklanjuti, sebagai berikut :



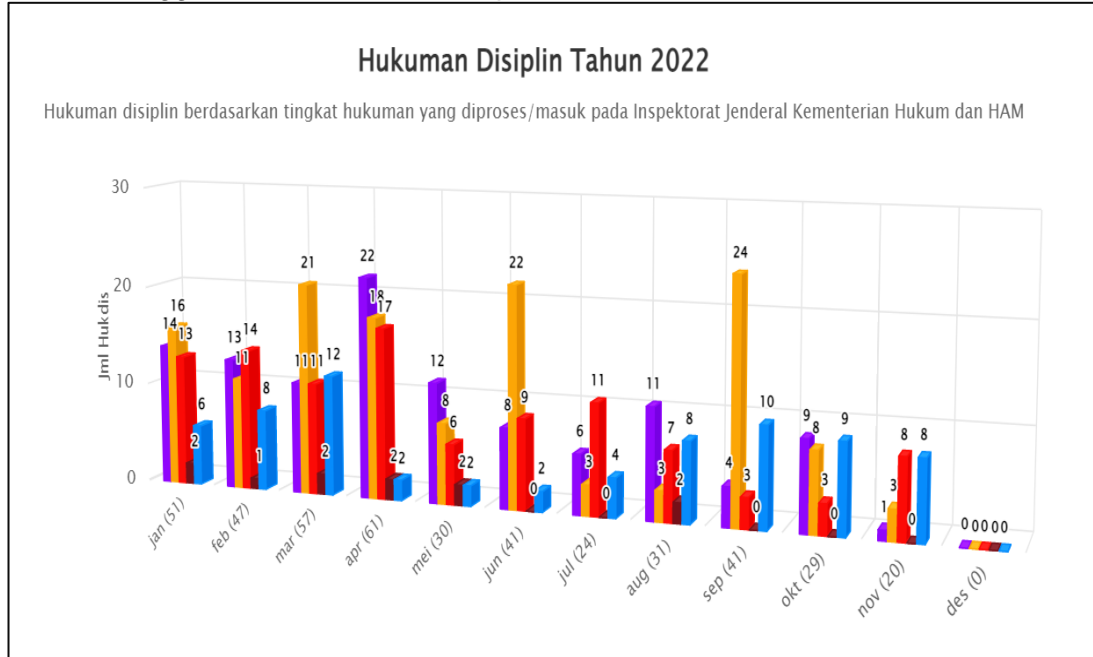
Sumber data : dashboard pimpinan itjen <https://itjenkumham.id/ds/> per 25 November 2022

Bahwa sd Tahun 2022 total rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK sebanyak 376 temuan dengan 965 rekomendasi. Dari temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 729, belum sesuai rekomendasi sebanyak 141 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 95 rekomendasi, sebagai berikut :



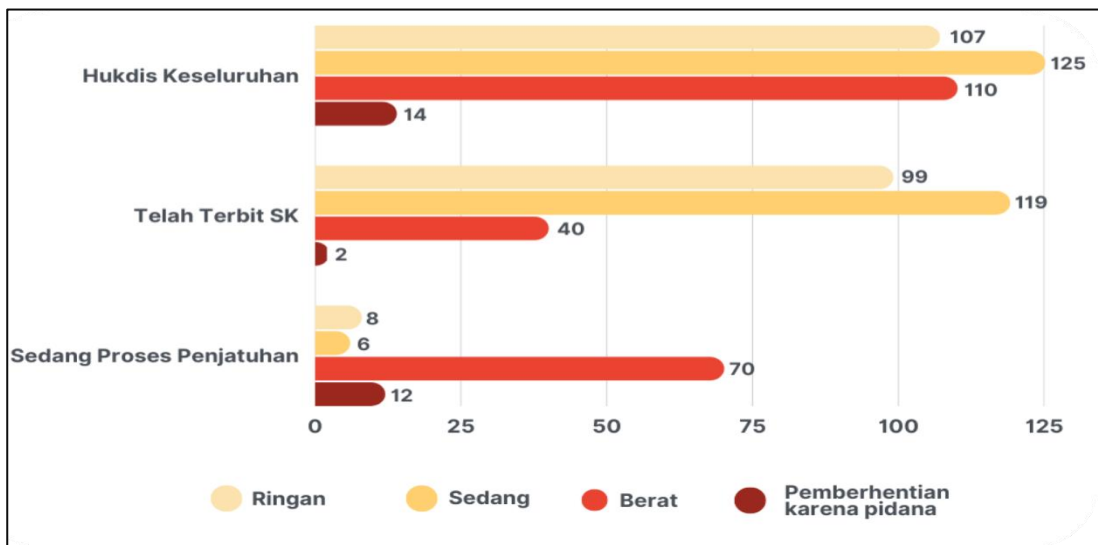
Sumber data : dashboard pimpinan itjen <https://itjenkumham.id/ds/> per 25 November 2022

9.4 Data Pelanggaran dan Hukuman Disiplin



Sumber data :
 dashboard pimpinan itjen <https://itjenkumham.id/ds/> per 25 November 2022

Statistik Proses Hukuman Disiplin Berdasarkan Tingkatan



Sumber data :
 Paparan Inspektur Jenderal pada Rakordal Kemenkumham 24 Nov 2022

10. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan PMPI Tahun 2022 dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan melibatkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada saat:

- 1) Persiapan dilakukan rapat pembahasan internal Itjen, pembahasan dengan Balitbang Hukum dan HAM melalui kegiatan penelitian efektifitas PMPI, masukan dan saran dari narasumber KPK dan ITJEN Kementerian Keuangan.
- 2) Pelaksanaan dilakukan melalui:
 - a) penyampaian surat Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Survei PMPI Tahun 2022,
 - b) dilanjutkan dengan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Teknik Tata Cara Pengisian PMPI dengan mengundang seluruh perwakilan satuan kerja,
 - c) updating data survei PMPI, dilakukan setiap minggu dan diinfokan di halaman website itjen.kemenkumham.go.id pada menu survei PMP,
 - d) Korespondensi melalui telepon dan whatsapp antara satuan kerja dengan ITJEN,
 - e) Arahan pimpinan.
- 3) Pelaporan, dilakukan melalui pembahasan penyampaian Laporan hasil penilaian PMPI kepada Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Selain itu hasil penilaian PMPI menjadi khasanah sebagai unsur pembanding dengan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK (yang sampai dengan saat ini masih dalam proses analisis penilaian oleh KPK), juga dengan hasil penilaian integritas yang dilakukan melalui QR Code Balitbang Hukum dan HAM.

c. Kendala / Hambatan

Dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Tahun 2021 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penilaian yaitu :

- 1) Dasar hukum belum optimal karena masih berpedoman pada Pedoman Penilaian Persepsi Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor ITJ-07.OT.02.02 tanggal 20 Juni 2019 mengingat yang dilakukan survei adalah seluruh Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini terbukti dengan masih terdapat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang belum berpartisipasi mengikuti survei PMPI, selain itu jumlah responden di UPT masih ada yang sangat sedikit sehingga kurang mewakili hasil survei di UPT dimaksud.
- 2) Perubahan mekanisme survei yang di Tahun 2022 ini sudah melibatkan dan memasukan menu pilihan seluruh Unit Pelaksana Teknis, sehingga untuk menarik data/merekap data mengalami kesulitan untuk melakukan Analisa dan pengelompokannya.
- 3) Belum optimalnya satuan kerja merespon permohonan mengisi survei
- 4) Hasil dari survei PMPI belum cukup kuat menggambarkan kondisi tentang persepsi integritas baik ASN maupun Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham. Hal ini dikarenakan jumlah responden internal masih ada yang dibawah ketentuan yang terdapat dalam surat Inspektur Jenderal (seluruh pegawai kemenkumham).

d. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PMPI Tahun 2022 terjadi pergeseran hasil survei indikator terendah baik pada survei PMPI Internal maupun PMPI Eksternal. Dengan perbandingan sebagai berikut :

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
Survei PMPI Internal	Jumlah Responden : 5.240 pegawai	Jumlah Responden : 3.971 pegawai	Jumlah Responden : 43.115 pegawai	Jumlah Responden : 28501 pegawai
	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi
	Indeks Internal : 89,26	Indeks Internal : 87,07	Indeks Internal : 88,89	Indeks Internal : 94,68
Survei PMPI Eksternal	Jumlah Responden : 1.574 orang	Jumlah Responden : 2.806 orang	Jumlah Responden : 10.365 orang	Jumlah Responden : 4209 orang
	Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi	Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi	Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi	Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi
	Indeks Eksternal : 85,93	Indeks Eksternal : 95,66	Indeks Eksternal : 94,75	Indeks Eksternal : 95,84
Penilaian Lapangan	Pada Unit Eselon I (Ditjen AHU, Ditjen KI), perwakilan Kanwil (Kanwil DKI) dan perwakilan UPT Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang, BHP Jakarta, Kanim Jakarta Utara, Kanin Jakarta Selatan, Kanim Jakarta Timur, Ditjen Kekayaan Intelektual, Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Lapas Salemba. Jawaban tertinggi responden masyarakat pengguna layanan Sangat Baik (SB)	Pada 8 Kanwil yaitu Kanwil : DI Aceh, Banten, Jawa tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah. Jawaban tertinggi responden masyarakat pengguna layanan Sangat Baik (SB).	Tidak dilakukan dikarenakan adanya Kebijakan Pemerintah (PPKM) dan dilakukan Refocussing / penghematan belanja negara untuk pencegahan dan penaganna COVID19 Nasional.	Sampling 4 (empat) Kanwil /perwakilan UPT yaitu Kanwil DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

Indeks Rata-rata	87,59 (sangat baik)	91,36 (sangat baik)	91,82 (sangat baik)	95,26 (sangat baik)
Skala Penilaian : 0-20 = Sangat Buruk 21-40 = Buruk 41-60 = Cukup 61-80 = Baik 81-100 = Sangat Baik				

2. *Highlight* hasil survei PMPI Internal Tahun 2022

Dan perbandingan 4 (empat) indikator survei PMPI Internal di peroleh nilai terendah adalah pada indikator Sistem Anti Korupsi (15,16). Nilai indikator Sistem Anti Korupsi tersebut naik sebesar 0.24 dari tahun 2021 (14,92) Hal tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun telah dilakukan sosialisasi anti korupsi, namun masih terdapat pegawai :

- a) yang belum memahami tentang sistem anti korupsi
- b) yang belum mengetahui bahwa Kemenkumham telah ada sistem pencegahan korupsi
- c) yang tidak percaya bahwa sistem anti korupsi di Kemenkumham itu efektif mencegah dan mampu membuat pegawai menghindari korupsi
- d) yang tidak percaya bila ada pegawai yang berbuat KKN akan diproses secara administrasi dan/ atau hukum
- e) yang melihat/ mendengar/ melaporkan pelaku KKN di Kemenkumham
- f) tidak percaya pegawai yang melaporkan praktik korupsi di instansi Anda akan mendapat perlindungan
- g) yang tidak tahu bahwa Kemenkumham terdapat mekanisme perlindungan pelapor

3. *Highlight* hasil survei PMPI Eksternal Tahun 2022

Dan perbandingan dua indikator survei PMPI Eksternal di peroleh nilai terendah adalah pada indikator Budaya Integritas Organisasi (31,96). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa

walaupun Kemenkumham sudah melakukan kampanye /himbauan anti korupsi, melalui pemasangan spanduk, banner, stiker, poster dan lainnya, dalam upaya pencegahan korupsi, namun terdapat pengguna layanan menjawab bahwa Kemenkumham :

- a. belum optimal menerapkan keterbukaan (transparansi) dan mudah dipahami ketika berurusan dengan pihak luar, meliputi keterbukaan instansi menyampaikan semua informasi yang anda perlukan.
- b. Masih ada pemberian perlakuan khusus atau prioritas pada orang tertentu seperti perlakuan khusus: jalur cepat, prioritas, memotong antrian dan lainnya. Prioritas: memberikan layanan khusus pada orang/kelompok yang membayar, memiliki hubungan dengan pejabat dan lainnya.
- c. Masih menerapkan bahwa asal usul/ golongan seseorang mempermudah/ mempersulit ketika berurusan dengan Kemenkumham misal asal usul/golongan : suku, agama, kekerabatan, almamater, dan lainnya.
- d. belum memiliki tata cara menerima laporan masyarakat terkait korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya (tata cara pelaporan korupsi/ gratifikasi/ pungli dan lainnya serta tersedia nomor, saluran atau orang yang bisa dihubungi).
- e. kurang memberikan perlindungan untuk masyarakat yang melaporkan korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya berupa memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan pelapor.

- f. 1% menjawab bahwa laporan masyarakat tentang korupsi di Kemenkumham kurang segera ditindaklanjuti meliputi melakukan penyelidikan kejadian, memproses pelaku, pemberian sanksi kepada pegawainya.

e. Saran

Dari pelaksanaan penilaian, kendala dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Hasil dari Penilaian Mandiri Persepsi Integritas akan digunakan sebagai data untuk mengisi capaian target :
 - a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2022 yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 yaitu Indeks Persepsi Integritas yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal dalam capaian targetnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal;
 - b. Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal.
 - c. Bahan masukan untuk menyusun kebijakan pengawasan dan manajemen risiko;
 - d. Mengidentifikasi area yang rentan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tindakan lain yang mencederai budaya integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Bahan masukan untuk membangun program/kegiatan penguatan budaya integritas,
 - f. Mendorong peran serta pemangku kepentingan dalam mendukung budaya integritas unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g. Upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. Data tambahan untuk penilaian evaluasi reformasi birokrasi dan evaluasi pembangunan zona integritas WBK/WBBM.
- 2) Meningkatkan legalitas Pedoman Penilaian Persepsi Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor ITJ-07.OT.02.02 tanggal 20 Juni 2019 menjadi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, mengingat yang dilakukan survei adalah seluruh Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Melanjutkan kerjasama dengan PUSDATIN untuk perlindungan server ITJEN sebagai sarana/wadah aplikasi pelaksanaan PMPI secara *online*, agar tidak diretas.
- 4) Perlu komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan PMPI di setiap tahapannya.
- 5) Penekanan kepada satuan kerja untuk memantau jajarannya agar seluruhnya ikut berpartisipasi dalam survei.
- 6) Bekerjasama dengan Balitbang Hukum dan HAM dan KPK RI, untuk survei sejenis di tahun berikutnya agar satu survei datanya dapat digunakan bersama baik oleh Inspektorat Jenderal, Balitbang Hukum dan HAM maupun oleh KPK sebagai data dasar penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI KPK).
- 7) Hasil survei PMPI menjadi bahan referensi dengan hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang wajib dan diminta di deskripsikan dalam Laporan Kinerja (LKjIP/LAKIN/LAKIP).
- 8) Untuk tahun 2023 dan yang akan datang survei PMPI tidak akan dilakukan lagi dengan pertimbangan agar tidak ada terlalu banyak survei yang sejenis yaitu selain penilaian integritas oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM, juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu juga ada survei yang hampir mirip dengan survei PMPI eksternal yaitu survei organisasi untuk yang dilakukan saat penilaian PMPRB satuan kerja oleh APIP. Sehingga di Tahun 2023 dan yang akan datang Inspektorat Jenderal akan berfokus pada penguatan Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inspektorat Jenderal sebagai mitra kerja dari KPK akan memberikan penguatan terkait survei dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, merupakan perjalanan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM berupaya menciptakan nilai tambah dalam melaksanakan kinerjanya. Berkembangnya penerapan teknologi informasi haruslah diimbangi dengan peningkatan integritas pegawai agar tidak disalahgunakan untuk mendapatkan informasi. Penggunaan informasi yang tepat dan akurat sebagai landasan untuk penerapannya sehingga dapat mendukung kesiapan Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi tantangan di masa depan. Berkembangnya teknologi informasi yang mendukung percepatan pemberian layanan kepada masyarakat sudah selayaknya dan sepatutnya tidak mengikis jiwa integritas. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, perlu dilakukan upaya inovasi agar integritas tetap terjaga di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Apresiasi kami, jajaran Inspektorat Jenderal, kepada 11 Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah termasuk didalamnya Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta masyarakat/pengguna layanan atas kerjasama selama pelaksanaan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Tahun 2022 berlangsung.

0000